

e-news letter

APR III 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



22 TAHUN PKS

Berkhidmat untuk Kemaslahatan Rakyat

22 Tahun PKS, Ternyata Masih Millennial

Lazimnya perubahan tidak bisa dibendung, namun demikian bukan berarti bahwa semua yang lama harus berganti dengan yang baru. Karena sejatinya tidak ada konsep yang terlampaui dominan atau powerful, selalu ada celah ketidaksempurnaan atas sebuah dominasi

Ada sebuah ungkapan "Time flies when you're having fun." Waktu berlalu dengan cepat jika anda sedang bersenang-senang. Saat kita mengerjakan sebuah urusan dengan perasaan senang dan cinta, maka kita akan tenggelam di dalamnya, bahkan seringkali tidak sadar sudah melewati berbagai hal. Tanya saja perasaan tersebut kepada guru yang sedang mengajar atau kepada anak yang bermain bola bersama sahabatnya. Mereka antusias, fokus dan tidak mengenal lelah.

Tidak terasa ternyata Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjejak di alam demokrasi Indonesia sudah genap 22 tahun. Sejak berdiri tahun 1998 bernama awal Partai Keadilan (PK), kemudian bertransformasi menjadi PKS tidak terasa sudah melampaui empat kali pemilu dan ratusan pilkada. Waktu yang tidak bisa dibbilang singkat, kala itu memulai dengan

seederhana, masih sangat muda dan mencoba-coba. Adapun kini masih sederhana, sudah mulai berumur dan punya sedikit pengalaman. Wow, ternyata masih tetap muda. 22 Tahun adalah usia millennial, sedang masa "kinyis-kinyis" dan "trengginas". Percayalah selalu ada ruang untuk membesarkan hati, sebagaimana selalu ada jalan menuju Rhoma. Terlalu...

22 tahun, landscape sudah sangat jauh berbeda baik dibidang sosial, budaya maupun politik. Gaya kampanye dan berbagai pendekatan yang dulu nampak ampuh, kini sebagian malah dianggap tidak relevan. Karena ter-disrupti oleh berbagai hal baru yang lebih dinamis, efisien dan efektif. Utamanya tergerus karena perkembangan Information Communication and Technology (ICT) yang semakin dominan dan secara faktual telah merubah pola komunikasi

dipelbagai sendi kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Adaptasi menjadi kata kunci yang paling penting dalam melalui seluruh proses transformasi tersebut, Alhamdulillah sejauh ini "so far so good" buat PKS.

Lazimnya perubahan tidak bisa dibendung, namun demikian bukan berarti bahwa semua yang lama harus berganti dengan yang baru. Karena sejatinya tidak ada konsep yang terlampaui dominan atau powerful, selalu ada celah ketidaksempurnaan atas sebuah dominasi. Buktinya saat sebagian besar mengganggu berkhidmat berbasis program pelayanan dasar (charity) seperti baksos, pembagian APD, potong gaji dan sejenisnya merupakan hal yang mubazir serta tidak membawa efek electoral (keterpilihan). PKS tetap mempertahankan "social campaign" model tersebut.

Meski tentu saja disaat yang bersamaan perjuangan dan keseriusan dalam mengawal kebijakan tidak dilalaikan. Masih punya hasrat untuk mendorong Pansus Jiwarsraya dan Hak Interpelasi iuran BPJS, menolak pembahasan RUU Omnibus law dalam kondisi covid 19, mendorong karantina wilayah atau lockdown parsial dan lainnya. Karena kami percaya bahwa semua sudah



ada bagiannya, sebagaimana karakteristik pemilih yang terbagi atas rasional, emosional bahkan yang irasional.

22 Tahun lalu kita berhipun bersama dan membulatkan tekad untuk turut serta dalam pusran Demokrasi di Indonesia. Pasang surut telah kita lewati, ada suka pun duka. semua dipergilirkan dengan sempurna sesuai sunnatullah.

Berebak Bismillah. Waktu berlalu orang-orang terbaik telah medahului kita menghadap Allah SWT, di sisa usia kita tetap bertahan dan bersabar untuk menyambut lebih banyak yang datang. Berjuang di Parlemen sungguh bagai meliuk "syantik" di gelombang besar, menelisk diantara karang terjal dan tetap

"santuy" saat tak sejalan dengan rekan kompetisi. Mengokohkan perjuangan dan tetap berkhidmat menguatkan solidaritas.

Alhamdulillah bahtera ini tetap melaju meniti Samudera perjuangan, setiap kayuhan melewati fase dan usia dengan niat karena Allah ta'ala. Hari esok insyaAllah tidak hanya kita songsong dengan kesuksesan dan pencapaian, namun juga mimpi bahwa seluruh amal ini akan memberi bekal terbaik saat menghadap Sang Khalik.

Atas Nama Fraksi PKS DPR RI kami mengucapkan Selamat Milad PKS ke 22 untuk Partai Keadilan Sejahtera. Barrakallahufikum....

Humas Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MILAD **2** tahun
1998 - 2020



BERKHIDMAT UNTUK RAKYAT

Wujudkan Solidaritas Nasional,
Kian Kokoh Melayani Rakyat

Ayo Lebih Baik



H. Sukamta, Ph.D
Wakabid Polhukam

Drs. H. Adang Daradjatun
Waka Bidang Kinerja

Habib Aboe Bakar Alhabsyi,
Bendahara Fraksi

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T
Sekretaris Fraksi

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Wakabid Kesra

H. Ecky Awal Mucharam
Wakabid Ekonomi dan Keuangan

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
Wakabid Inbang

Sambut Milad PKS ke-22

Kado Terbaik Fraksi PKS DPR Adalah Pelayanan Kepada Rakyat



Jakarta (19/4) - Partai Keadilan Sejahtera menyukuri miladnya ke 22 tahun yang jatuh pada tanggal 20 April 2020. Fraksi PKS DPR sebagai garda terdepan PKS menyambut Milad ke-22 PKS dengan memperkuat komitmen melayani rakyat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR dalam sambutannya tentang milad ke-22 PKS.

Di tengah kondisi pandemi corona yang melanda bangsa ini, bukannya surut, Fraksi PKS justru meningkatkan pelayanan dengan aksi nyata kepedulian kepada rakyat khususnya mereka yang terdampak langsung, tenaga medis, pekerja informal dan harian, serta masyarakat miskin dan marjinal. Fraksi PKS juga mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan gotong royong, bahu membahu membantu rakyat yang kesusahan.

"Bangsa kita dalam kondisi prihatin akibat pandemi corona. Fraksi PKS menganggap pelayanan, kepedulian, dan aksi nyata melayani rakyat terdampak covid-19 sebagai kado terbaik milad ke-22 PKS. Tidak cukup hanya Fraksi PKS, seluruh komponen bangsa harus menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di saat ini," tegas Jazuli.

Fraksi PKS dari pusat dan daerah, lanjut Jazuli, berlomba-lomba memotong gaji anggota legislatif untuk penanganan covid, menginisiasi gerakan bagi masker dan disinfektan gratis, bantuan APD untuk pahlawan medis, hingga bantuan paket sembako untuk rakyat kecil. Hal itu dilakukan tanpa putus sejak wabah corona melanda hingga hari ini.

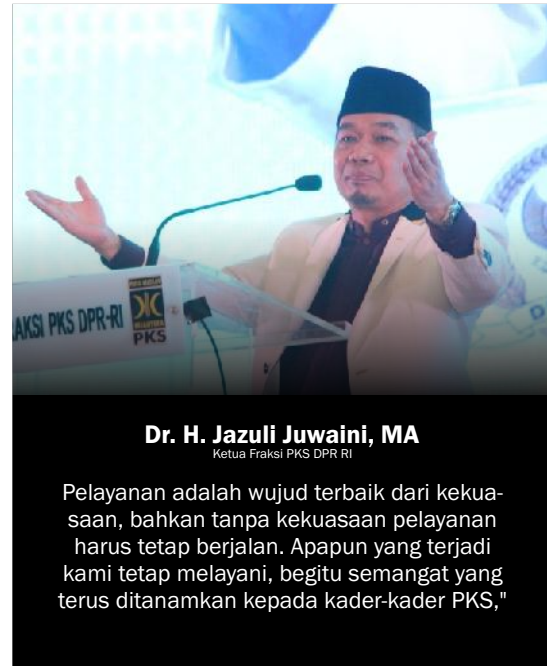
"Inilah spirit kami di PKS, partai bukan sarana meraih kekuasaan an-sich, tetapi sarana pelayanan kepada rakyat. Pelayanan adalah wujud terbaik dari kekuasaan, bahkan tanpa kekuasaan pelayanan harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi kami tetap melayani, begitu semangat yang

terus ditanamkan kepada kader-kader PKS," ungkapnya.

Karena spirit pelayanan itulah, Fraksi PKS di DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hadir dengan tiga garis perjuangan, yaitu: prokerakyatan, prokeumatan, dan proengokohan nasionalisme Indonesia. Ketiganya untuk mewujudkan visi Fraksi PKS: Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter, Bermartabat, Adil, dan Sejahtera.

Agenda kebangsaan Fraksi PKS adalah: (1) Memperkuat identitas kebangsaan dengan mengokohkan Pancasila sebagai platform bersama. (2) Mewaspada ancaman yang merongrong Pancasila, UUD NRI 1945 dan NKRI (liberalisme, sekularisme, komunisme, terorisme, dan spartisme. (3) Mengokohkan ketahanan nasional dan spartisme tangtangan global

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Pelayanan adalah wujud terbaik dari kekuasaan, bahkan tanpa kekuasaan pelayanan harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi kami tetap melayani, begitu semangat yang terus ditanamkan kepada kader-kader PKS,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**BERKHIDMAT
UNTUK RAKYAT**

Wujudkan
Solidaritas Nasional,
Kian Kokoh
Melayani Rakyat

Ayo Lebih Baik

*Fraksi PKS di DPR dan DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mewujudkan visi Fraksi PKS :
Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter,
Bermartabat, Adil, dan Sejahtera*

Drs. H. Adang Daradjatun

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kinerja



Milad PKS Ke 22

Habib Aboe: Momentum Kontribusi dan Kolaborasi Lebih Baik



Jakarta (21/4) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi berharap Milad PKS ke 22 menjadi momentum untuk berkontribusi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, bersama hadirin Indonesia yang lebih baik.

"Selamat Milad PKS yang ke 22, semakin kokoh melayani rakyat. Terlebih dalam situasi krisis saat ini peran PKS untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi bersama seluruh elemen bangsa." ujar Aboe Bakar Al Habsyi melalui surel media (21/04).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini berpesan, saat ini PKS telah

menjadi salah satu entitas politik yang ada dalam sistem demokrasi Indonesia. Karenanya tidak boleh lelah dalam mendorong hadirnya politik yang luhur, produktif dan memberi kemaslahatan bagi banyak orang.

"Sejumlah langkah dan program yang selama ini berorientasi pada khidmat dan pelayanan untuk rakyat agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bersama dengan itu, perjuangan dan keseriusan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat juga lebih serius". Ulas Aboe.

Tantangan Indonesia saat ini dan kedepan tidaklah mudah, perlu usaha bersama dengan segenap elemen bangsa. Kompetisi dan persaingan harus dilandasi pada keinginan berkontribusi terbaik. Jika itu yang menjadi dasar, sesungguhnya akan lebih mudah menemukan titik temu berbagai kebaikan.

"Insyallah pada akhirnya waktu akan membuktikan bahwa kerja-kerja yang serius untuk berkontribusi lebih baik dan berkolaborasi lebih adaptif akan meraih hasil terbaik" jelasnya.

Aboe juga mengharapkan masukan dan saran bagi partainya, agar terus dapat memperbaiki diri dan terus belajar. Terlebih dalam konteks parlemen, harapannya mampu menghasilkan dan mendorong regulasi yang baik bagi rakyat.

PKS yang merupakan transformasi dari Partai Keadilan (PK) di deklarasikan pada tanggal 20 April 2020 di Jakarta. Saat ini telah menginjak usia ke 22.



Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Ketua MKD DPR RI

Sejumlah langkah dan program yang selama ini berorientasi pada khidmat dan pelayanan untuk rakyat agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bersama dengan itu, perjuangan dan keseriusan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat juga lebih serius



Milad PKS ke-22

Bukhori: PKS Garda Terdepan Pelayan Rakyat



Jakarta (20/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan PKS semakin mengokohkan jati dirinya sebagai garda terdepan pelayan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Bukhori, peran aktif PKS dalam merespon Covid-19 sejalan dengan instruksi presiden PKS terkait penanganan Covid-19.

Menurutnya, kinerja PKS dalam merespon pandemi adalah kerja kolosal yang melibatkan kader dari tingkat pusat sampai tingkat akar rumput

“Kami memahami bahwa berkhidmat untuk rakyat tidak bisa dilakukan secara parsial, butuh keterlibatan kolektif.

Tidak heran, jika di masa pandemi ini semua kader kami dari tingkat pusat sampai akar rumput bergerak aktif untuk melakukan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak

Covid-19” ungkap Bukhori saat memperingati Milad PKS ke-22 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Ahad (19/04/2020).

Sebelum terjadinya kasus Covid-19 pertama di Indonesia (02/03/2020), Bukhori merupakan salah satu politisi PKS yang langang dalam mengingatkan pemerintah untuk waspada dan sigap dalam menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia. Advokasinya terhadap isu ini telah dimulai sejak 27 Februari 2020 ketika menanggapi keluhan pasien suspect Corona di RSUP dr. Kariadi Semarang.

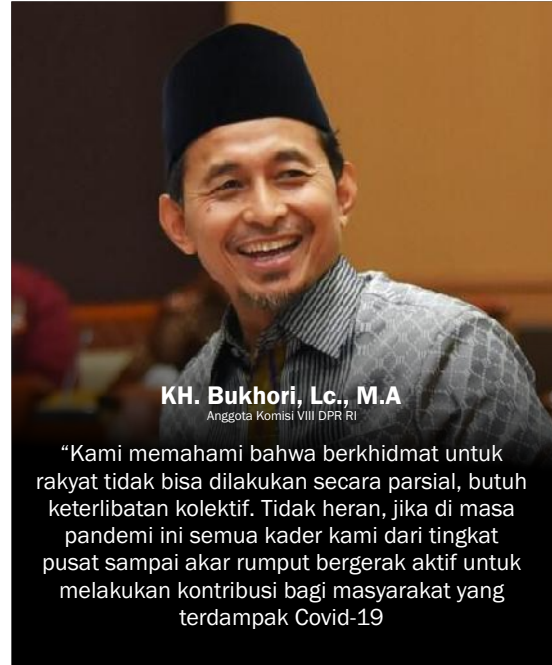
Selain melakukan advokasi terhadap pemerintah, PKS juga aktif dalam melakukan advokasi masyarakat lemah yang terdampak melalui gerakan potong gaji yang dilakukan oleh anggota dewan dari tingkat pusat sampai daerah dan pembentukan gugus tugas PKS di daerah.

“Komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi krisis, salah satunya kami wujudkan dengan

memangkas gaji kami (red: para anggota dewan) untuk disumbangkan bagi penyediaan APD tenaga medis dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Sedangkan untuk kader di daerah, mereka membentuk gugus tugas sesuai instruksi Presiden PKS dengan tugas pokok berupa penyuluhan edukatif, distribusi APD dan alat kesehatan kepada tenaga medis, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19” sambungnya.

Lebih lanjut, Bukhori juga mengungkapkan secara pribadi telah mengirimkan bantuan sebanyak 10 ton beras dan 400 liter hand sanitizer di dapilnya (Kab. Semarang, Kendal, Kota Semarang, dan Salatiga) untuk mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan akibat wabah Covid-19. Selain itu, bantuan sembako sebanyak 1000 paket juga telah disiapkan untuk didistribusikan di masing-masing dapil.

“Alhamdulillah, kami telah menyiapkan paket sembako yang terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula,



KH. Bukhori, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Kami memahami bahwa berkhidmat untuk rakyat tidak bisa dilakukan secara parsial, butuh keterlibatan kolektif. Tidak heran, jika di masa pandemi ini semua kader kami dari tingkat pusat sampai akar rumput bergerak aktif untuk melakukan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19

dan 30 bungkus mie instan per paket. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bantuan tersebut akan diantar langsung ke masing-masing rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya sudah diverifikasi oleh

koordinasi masing-masing wilayah. In sha Allah, pada Senin siang (20/04/2020) paket sembako mulai disalurkan oleh tim kami di lapangan.” ungkapnya.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Anggota FPKS Minta Validasi IMEI Harus dengan Semangat Per- lindungan Konsumen

Pemerintah membuat regulasi dan sistem harus terpadu, antara Kemenperin, Kominfo, operator seluler ingat penggunaan ponsel lebih dari 280 juta gawai jangan sampai diberlakukan mundur karena itu merugikan konsumen, mereka membeli ponsel tentu berfikir bahwa semua yang dijual digerei atau online itu adalah legal,

Anggota FPKS Minta Validasi IMEI Harus dengan Semangat Perlindungan Konsumen

Pemerintah membuat regulasi dan sistem harus terpadu, antara Kemenperin, Kominfo, operator seluler ingat penggunaan ponsel lebih dari 280 juta gawai jangan sampai diberlakukan mundur karena itu merugikan konsumen, mereka membeli ponsel tentu berfikir bahwa semua yang dijual digeraai atau online itu adalah legal

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (17/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Kharis Al-masyhari mendukung kebijakan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang diteken tiga menteri, Kominfo, Perdagangan dan Perindustrian pada 18 Oktober 2019 dan rencananya akan diberlakukan besok pada 18 April 2020.

"Validasi IMEI dapat menjadi faktor penguat bagi industri seluler serta melindungi konsumen dari barang 'black market' atau barang ilegal namun pe-

nerapannya jangan sampai mengorbankan konsumen yang sebelum peraturan ini diberlakukan telah membeli perangkat seluler yang IMEInya tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian" Jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media hari Jumat (17/04/2020).

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI ini menambahkan bahwa Kominfo harus siap dengan regulasi yang terpadu bersama dengan Kementerian terkait agar tidak muncul kegaduhan

dimasyarakat, mengingat perangkat seluler yang aktif melebihi jumlah penduduk Indonesia.

"Pemerintah membuat regulasi dan sistem harus terpadu, antara Kemenperin, Kominfo, operator seluler ingat penggunaan ponsel lebih dari 280 juta gawai jangan sampai diberlakukan mundur karena itu merugikan konsumen, mereka membeli ponsel tentu berfikir bahwa semua yang dijual digeraai atau online itu adalah legal," terang Kharis.

Karena itu Anggota DPR asal Solo ini juga meminta bahwa validasi IMEI ini diberlakukan terhadap semua ponsel yg dibeli konsumen setelah 18-4-20.

"saya berharap Sistem Informasi Industri Nasional dan aturannya hanya berlaku bagi ponsel yang dibeli sesudah tanggal 18 April 2020, sehingga pengguna ponsel yang sudah aktif sebelum aturan ini berlaku tetap terlindungi dan Industri Seluler Nasional juga akan menjadi lebih bergairah karena terlindungi dari serbuan barang ilegal dipasaran" tutup Kharis.



Indian Muslim Accused For Spreading COVID-19

Indonesian MP: We Condemned it!

Of course this is also inseparable from the long history of conflict there. Recently, India released a bill on immigration and citizenship which discriminates the Muslims. However, some Hindus also reject the allegation that the Muslims are spreading COVID-19 among Indian people”

H. SUKAMTA, Ph.D

Indonesian MP

Jakarta (17/03) — COVID-19 pandemic created a wave of anti-Islamic sentiment in India as activities held by Tablighi Jamaat are alleged as the source of COVID-19 transmission in the country. Indonesian MP, Sukamta deeply regrets the situation.

" In the midst of difficulties caused by the COVID-19 pandemic like this, we are so saddened that some people are using it to demonize followers of certain religions. COVID-19 is attacking everyone, without looking to any race, ethnicity, and religion. It is a pity that Muslims, who are the victim themselves, are accused of spreading the virus. As a country with the largest Muslim

population, Indonesia must defend Indian Muslim rights” said him (17/3).

According to Sukamta, who is also the Head of Foreign Relations Development of Justice and Prosperous Party (PKS), the accusation against Indian Muslims as the main spreader of COVID-19 is completely false. There are some people who are trying to frame this pandemic as a religious problem.

"Of course this is also inseparable from the long history of conflict there. Recently, India released a bill on immigration and citizenship which discriminates the Muslims. However, some Hindus also reject the allegation that

the Muslims are spreading COVID-19 among Indian people”

Sukamta added that two Indian diaspora organizations in the United States, the Indian Muslim Council of India (IAMC) and Hinduism for Human Rights (HFHR), jointly condemned allegation scapegoating Muslims and Tablighi Jamaat during the outbreak. According to them, the COVID-19 crisis was exploited by those in power and succeeded in sharpening religious conflicts in India.

"Indeed, Tablighi Jamaat grand event was held before India officially adopted the lockdown policy. But I appeal to all religious people throughout the world, we must be discipline on staying home, decrease our mobility, and cease any religious activities to help the government fight the COVID-19. This is our mutual interest. We hope there will be no people using the COVID-19 pandemic to sharpen religious sentiment against another group. And the important thing is we must end this pandemic in a safe and healthy way " said Sukamta who represents the Special Region of Yogyakarta.



DPR Sesalkan Tuduhan Warga Muslim Menyebarkan Covid-19 di India

Pemerintah membuat regulasi dan sistem harus terpadu, antara Kemenperin, Kominfo, operator seluler ingat penggunaan ponsel lebih dari 280 juta gawai jangankan sampai diberlakukan mundur karena itu merugikan konsumen, mereka membeli ponsel tentu berfikir bahwa semua yang dijual digeraikan atau online itu adalah legal

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (17/03) — Kasus pandemi Covid-19 menciptakan gelombang sentimen agama di India. Pasaunya, kegiatan tabligh akbar yang diselenggarakan oleh sebuah jama'ah Muslim disana menjadi salah satu titik penyebaran penularan Covid-19 di India.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Jumat (17/04) di Jakarta mengaku menyesal dengan adanya Kondisi tersebut.

"Saya sangat menyesalkan

kejadian ini. Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 begini, ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menghembuskan sentimen kepada pemeluk agama tertentu. Covid-19 tak memandang ras, suku, agama, menyerang siapa saja. Sangat menyedihkan jika warga Muslim sudah menjadi korban Covid-19, masih dituduh pula sebagai penyebar virus tersebut. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB musti

bersikap. Ditambah pula peran sebagai negeri dengan Muslim terbesar, Indonesia musti membela tegaknya hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk untuk warga Muslim di India," ungkapnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menambahkan bahwa isu kaum Muslim sengaja menyebarkan virus corona itu akal-akalan saja. Ada beberapa pihak di sana mengarahkan masalah pandemi Covid-19 ke arah sentimen agama.

"Tentunya ini juga tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di sana. Sebelumnya bahkan India membuat RUU tentang keimigrasian dan kewarganegaraan yang diskriminatif bagi warga Muslim. Meskipun sebetulnya beberapa pihak pemeluk Hindu sendiri menyesalkan sikap menuduh Muslim India sengaja menyebarkan virus corona di tengah masyarakat India", terangnya.

Sukamta menambahkan, dua organisasi diaspora India di Amerika Serikat, the Indian



American Muslim Council (AMC) dan Hindus For Human Rights (HfHR), mengeluarkan pernyataan bersama yang mengancam tindakan mengkambinghitamkan minoritas muslim soal wabah Corona, terutama melalui Jemaah Tabligh. Menurut mereka, krisis COVID-19 dieksploitasi oleh mereka yang berkuasa dan berpengaruh untuk mempertajam konflik agama di India.

"Memang acara tabligh akbar yang diselenggarakan oleh salah satu jama'ah di sana dilakukan sebelum India resmi memberlakukan lockdown. Tapi Saya mengimbau kepada seluruh umat beragama di

seluruh dunia, agar mari kita berdisiplin untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini, dengan stay at home, sangat membatasi mobilitas, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat kerumunan untuk sementara waktu. Ini demi kepentingan kita bersama. Kita berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mengarahkan pandemi Covid-19 ini kepada sentimen agama. Sekarang yang penting kita bisa segera ke luar dari situasi pandemi ini dengan selamat dan sehat," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Nasir Djamil Dukung Kapolri Bantu Supir Taksi dan Angkutan Barang

Upaya ini, adalah bukti nyata bahwa Polri bersama rakyat dan tentu untuk membantu Pemerintah. Kami tentu apresiasi langkah perlindungan terhadap para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini sangat terpukul akibat penghasilannya menurun

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Aceh (16/04) — Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI Nasir Djamil mendukung sepe-nuhnya upaya Kapolri melalui Kakorlantas Polri untuk membantu para supir taksi dan angkutan barang yang saat ini mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi virus corona.

Upaya ini, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa Polri bersama rakyat dan tentu untuk membantu Pemerintah.

"Kami tentu apresiasi langkah perlindungan terhadap para supir taksi dan angkutan

barang yang saat ini sangat terpukul akibat penghasilannya menurun ", ujar Nasir Djamil

Menurut Nasir, inisiatif Kapolri yang nantinya akan dijalankan oleh Korlantas Polri itu, diharapkan mampu menjangkau para supir taksi dan angkutan barang yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Karena itu kecermatan dan validasi data sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Harapan kami agar program ini bisa menjangkau

seluruh wilayah di Indonesia", ujarnya

Dikatakannya, dalam rapat virtual Komisi III DPR RI bersama Kapolri beberapa waktu lalu, pihaknya telah meminta agar institusi Polri ikut serta mengurangi beban Pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona. Karena itu , Polri perlu memikirkan refocusing anggaran.

Akhirnya, lanjut Nasir, pihaknya mendapat informasi bahwa ada program Keselamatan Lalu lintas dan kemampuan lainnya kepada supir taxi dan angkutan barang (by name by adress yg belum dapat bantuan dari Pemerintah). Program ini dikemas dalam bentuk pendidikan lululintas secara online, dimana setiap yang ikut akan mendapat bantuan dana yg disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Program ini bersumber dari anggaran hasil refocusing dari kegiatan Polri. Yang penting pelaksanaannya harus kridibel dan akuntabel", ujar politisi PKS itu.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Johan Rosihan, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Anggaran Kementan Dipangkas, Johan: Bukti Pemerintah Tak Pro Ketahanan Pangan

pemangkasan sepertiga dari pagu anggaran kementan pada saat ini menunjukkan pemerintah tidak aware. Pemerintah tidak memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi krisis pangan di tengah arus kekacauan stabilitas pangan dunia saat pandemic Covid-19 belum bisa diatasi oleh seluruh negara di dunia ini

Anggaran Kementan Dipangkas

Johan: Bukti Pemerintah Tak Pro Ketahanan Pangan

Pemangkasan sepertiga dari pagu anggaran kementan pada saat ini menunjukkan pemerintah tidak aware. Pemerintah tidak memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi krisis pangan di tengah arus kekacauan stabilitas pangan dunia saat pandemic Covid-19 belum bisa diatasi oleh seluruh negara di dunia ini

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (17/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengkritik keras atas penyesuaian belanja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020, penyesuaian tersebut telah memangkas sebesar Rp 7 Triliun dari pagu awal sebanyak Rp 21 Triliun, sehingga pagu setelah penyesuaian Kementerian Pertanian menjadi hanya Rp 14 Triliun.

Johan menyebut, pemangkasan ini sebagai bentuk atau bukti pemerintah telah gagal faham cara membangun ketahanan pangan

di saat pandemic wabah Covid-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menilai pemangkasan sepertiga dari pagu anggaran kementan pada saat ini menunjukkan pemerintah tidak aware.

"Pemerintah tidak memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi krisis pangan di tengah arus kekacauan stabilitas pangan dunia saat pandemic Covid-19 belum bisa diatasi oleh seluruh negara di dunia ini," pungkas Johan.

Legislator asal Sumbawa

ini juga memaparkan bahwa pemangkasan anggaran Kementan akan mengganggu akselerasi produksi Pertanian, padahal kegiatan Pertanian bisa dilakukan melalui kegiatan padat karya dengan mempekerjakan para tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemic Covid-19.

"Kementan juga akan terhambat dalam urusan kelancaran distribusi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat pada situasi darurat Covid-19 ini," urai Johan.

Anggota Legislatif dipil NTB 1 ini menyampaikan bahwa dalam situasi wabah Covid-19 ini, Pemangkasan anggaran Kementan yang begitu besar, akan mengganggu program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin Pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan/vaksin dan



sarana produksi lainnya ke masyarakat petani untuk meningkatkan produksi pangan bagi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia.

Johan mencontohkan stok beras di Bulog pada akhir Februari 2020 lalu berjumlah 1.650.916 ton sehingga untuk mengantisipasi gejolak pangan

dalam situasi pandemic wabah ini diperlukan peningkatan produksi beras.

"Namun jika pemerintah telah memangkas anggaran ini begitu besar maka persediaan pangan kita sangat mengkhawatirkan," tegas Johan.

Harga Ayam Jatuh Akibat Covid-19

Slamet: Pemerintah Jangan PHP Kepada Peternak

para peternak rakyat ini adalah rakyat kecil, buruh dan bukan pengusaha besar. Dalam artian, kata dia, tidak cukup ditutupi dari penghematan anggaran di Kementan.”perlu langkah dan kebijakan strategis dalam persoalan ini

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (20/04) — Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) membeli ayam peternak yang harganya jatuh, imbas wabah Covid-19 mengundang perhatian anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Slamet.

“Pemerintah jangan memberi harapan palsu kepada para peternak mandiri di saat harga ternak jatuh,” ujar Slamet kepada media, Senin (20/4). Menurut dia, sebenarnya persoalan ayam mudah, tidak perlu terjadi jika pemerintah responsif sejak awal.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi ini mengatakan, hal ini bisa diatasi jika pemerintah melakukan

pembatasan grand parent stok yg masuk sejak awal. Atau lakukan pemusnahan doc sejak dini.

“Saya punya keyakinan, Kalau ini yg di lakukan pemerintah, insyaallah harga akan terkontrol,” tegasnya.

“Saya mengingatkan pemerintah bisa melakukan hal itu. Sebab pemerintah adalah pemegang otoritas. maka tidak akan terjadi masalah yang berkepanjangan seperti ini,” imbuhnya.

Menurut Slamet, para peternak rakyat ini adalah rakyat kecil, buruh dan bukan pengusaha besar. Dalam artian, kata dia, tidak cukup ditutupi

dari penghematan anggaran di Kementan.”perlu langkah dan kebijakan strategis dalam persoalan ini,” tambahnya.

Menurutnya, dalam rangka menjaga ketahanan pangan Indonesia sudah selayaknya anggaran pertanian ditambah, bukan malah sebaliknya di sunat.

“Pemerintah harus bekerja cepat sebagai langkah yang bijak dan cepat untuk mengantisipasi kebangkrutan usaha para peternak,” lugasnya.

Seperti diketahui, kata Slamet, harga ayam peternak jatuh sampai ke Rp 6000,- per kilogram. Sedangkan harga HPP Rp 17.000,- per kilogram.

Sebelumnya juga, sambutan Slamet, peternak di Jawa Timur membagi-bagikan secara gratis ayam-ayam ternak karena harganya terjun bebas.

Sehingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan berencana membeli ayam milik para peternak mandiri di Pulau Jawa karena harga jatuh akibat Covid-19 atau Corona.



Anggota FPKS Ajak Rekan DPR Fokus Awasi Penanganan Anggaran Covid-19

“Sekitar Rp.7.7 triliun anggaran KLHK harus dipastikan tepat guna menjadi jaring pengaman sosial, tidak boleh ada penghematan anggaran terhadap kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (16/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin mengajak rekan-rekannya di DPR RI untuk dapat sinergi dalam mencari solusi agar bencana Virus Corona (Covid-19) cepat selesai.

Salah satu upaya keseriusan penanganan wabah ini adalah dengan cara fokus mengerahkan segala sumber daya baik tenaga hingga anggaran pada penyelesaian wabah ini.

Hal-hal yang bisa ditanggungkan, ia mengusulkan agar bisa di undur bukan berarti dibatalkan. Ia mencontohkan salah satunya adalah pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang masih memungkinkan dapat diundur setelah wabah ini selesai ditangani 100%.

“Pembahasan produk

legislasi seperti halnya Omnibus Law Cipta Kerja, Saya berharap belum dibahas secara intensif dahulu pada masa sidang ini. Virus Corona (Covid-19) sedang menjadi wabah di Indonesia dan telah ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional. DPR RI merupakan lembaga vital, yang akan mampu memberi kontribusi dan sinergi untuk mencari solusi agar bencana cepat selesai”, tutur Hamid Noor Yasin yang merupakan anggota Fraksi PKS ini.

Legislator dapil Jateng IV ini, mengungkapkan secara prosedural, bahwa setiap pembahasan undang-undang, apalagi undang-undang strategis, harus ada partisipasi masyarakat dalam pembahasannya.

“Partisipasi saran dan ma-

sukan masyarakat sangat kita perlukan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bila wabah telah berakhir, buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan menjadi bagian pemberi masukan dan merumuskan, sehingga layak untuk diundang dalam rapat-rapat dengar pendapat” jelas Hamid.

Selain itu, Lanjut Hamid, ketika covid-19 ini selesai, DPR akan mampu dan fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan penanganan wabah ini. Ketenangan dan tidak terburu-buru akan meningkatkan konsentrasi semua pihak, sehingga hasil pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi produk yang berkualitas.

Alasan utama mengapa harus fokus penanganan covid-19 ini, sambung Anggota BURT DPR ini, adalah turut mendukung kinerja pemerintah yang memiliki Dua agenda utama dalam prioritas penanganan covid-19 yakni Kesehatan dan Pangan. Dua agenda prioritas ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yakni pangan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis.

“Fraksi PKS secara Institusi, sudah mengusulkan



ke DPR, agar ada penundaan pembahasan omnibuslaw. Bahkan bukan saja FPKS, beberapa fraksi lain juga mengusulkan hal yang senada. Saya yakin, semua pihak ingin covid-19 ini cepat selesai. Ada beberapa masukan yang kami terima, bahwa bila pembahasan omnibuslaw cipta kerja terus dilanjutkan, akan mengganggu penyelesaian wabah yang berarti juga tidak sejalan dengan kepentingan rakyat”, Jelas Hamid.

Anggota DPR RI komisi IV

ini sesuai membahas refocusing kegiatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengapresiasi berbagai bentuk kegiatan di KLHK yang telah diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Ia meminta KLHK untuk memastikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat sekitar hutan terpenuhi.

Selengkapnya di fraksi.pks.id
Foto : dpr.go.id

Ir. H. Sigit Sosiantomo

Anggota Banggar DPR RI

*Boroskan Anggaran
**Banggar Desak
Pemerintah Alinkan Kartu
Prakerja Untuk Bansos***

Sangat disayangkan, mestinya penghematan dari kemeterian lain ini dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di Sektor pangan (Kementan, KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita kedepan adalah ketersediaan pangan setelah pandemi Covid 19”

Boroskan Anggaran

Banggar Desak Pemerintah Alihkan Kartu Prakerja Untuk Bansos

Untuk bisa ikut pelatihan daring, peserta harus punya kuota internet. Ini kan membebaskan mereka. Sudah Tidak punya penghasilan, harus beli kuota juga. Aneh, kalau program ini terus dipaksakan

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Banggar DPR RI

Jakarta (16/04) — Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sositomomo menilai, Implementasi pelatihan online dalam program kartu prakerja hanya memboroskan anggaran.

Untuk itu, Sigit meminta pemerintah mengalihkan anggaran pelatihan online untuk bantuan sosial atau menambah alokasi anggaran kesehatan terkait pencegahan covid 19.

"Pelatihan online ini tidak efektif untuk mengurangi pengangguran dan tidak cocok untuk pencari kerja. Apalagi

dilakukan secara online bukan pelatihan fisik. Akibatnya, tujuan tidak tercapai dan hanya memboroskan anggaran," kata Sigit, anggota Banggar dari FPKS DPR RI.

Sigit menilai pelatihan online yang diselenggarakan oleh start up seperti Ruang Guru, Tokopedia, Bukalapak, Ovo dan lain-lain itu tidak membantu para pencari kerja di tengah pandemi corona.

Sebaliknya pandemi corona yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK.

"Untuk pelatihan online ini pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1 juta untuk setiap peserta. Jadi ada sekitar Rp5,6 Triliun yang akan masuk ke kantong start up. Ini jelas pemborosan anggaran. Dan dari sisi prioritas, program pelatihan ini belum prioritas. Yang harus diprioritaskan pemerintah itu bantuan sosial karena masyarakat butuh makan dan bantuan alat kesehatan untuk tenaga medis," kata Sigit.

Disisi lain, Sigit menilai program pelatihan secara daring ini juga akan membebani peserta. Dan sistem pemilihan peserta yang direkrut juga tidak transparan dan rawan penyalahgunaan.

"Untuk bisa ikut pelatihan daring, peserta harus punya kuota internet. Ini kan membebaskan mereka. Sudah Tidak punya penghasilan, harus beli kuota juga. Aneh, kalau program ini terus dipaksakan." kata Sigit.



Sigit juga ragu bila selesai mengikuti kelas, para peserta akan memiliki keterampilan yang nanti bisa bermanfaat di dunia kerja. Karena kelas yang diberikan lebih banyak berorientasi ke manajemen diri, bukan penambahan keterampilan berdasarkan teori dan praktik.

"Tujuan awal program kartu prakerja ini adalah mengurangi pengangguran dan mencegah pengangguran kembali serta mengatasi mismatch keterampilan tenaga kerja dengan dunia usaha. Tapi, ditengah ancaman resesi akibat pandemi corona seperti ini,

jangankan mencari kerja yang ada juga bisa di PHK. Jadi ada ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK justru masuk ke para start up." kata Sigit.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 T untuk kartu prakerja dimana RP5,6 Triliun diantaranya digunakan untuk membiayai pelatihan online oleh start up yang wajib diikuti oleh peserta. Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan intensif selama 3 bulan

Syahrul Harap Kebijakan Pembelian Bahan Baku Tak Hanya Saat Covid-19

“Kita bersyukur bahwa apa yang menjadi gagasan dan ide yang telah dikemukakan dalam rapat beberapa kali dengan PUPR agar pembangunan infrastruktur ini bisa menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh masyarakat kita yaitu diantaranya karet

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Riau (16/04) — Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maz’at mengapresiasi kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang akan mengakomodir pembelian karet hasil produksi petani untuk campuran aspal.

Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran sebesar Rp.100 miliar melalui program Padat Karya Tunai (PKT).

“Alhamdulillah, ini momen yang luar biasa. Saya sangat

mengapresiasi langkah ini untuk menangani efek ekonomi dari Covid-19 ini,” kata Syahrul Aidi saat di hubungi, di Jakarta, Rabu (15/4).

Anggota DPR RI dari Riau I ini menuturkan, jauh sebelum wabah penyebaran Covid-19 merebak, dirinya pun sudah mengusulkan beberapa kali ke pemerintah di berbagai kesempatan terutama pada rapat kerja dengan Kementerian PUPR, agar pemerintah mengakomodir berbagai produksi komoditas

masyarakat untuk diberdayakan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Kita bersyukur bahwa apa yang menjadi gagasan dan ide yang telah dikemukakan dalam rapat beberapa kali dengan PUPR agar pembangunan infrastruktur ini bisa menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh masyarakat kita yaitu diantaranya karet,” jelas mantan anggota DPRD Kampar ini.

Politisi PKS ini menyebut, tujuh tahun terakhir ini, harga karet ditingkat petani tersungkur di harga paling tinggi sekitar Rp.10 ribu per kilogram. Jauh berbeda pada tahun sebelumnya, dimana harga karet di tingkat petani mencapai Rp.25 ribu per kilogram.

“Dimana ekonomi masyarakat sangat jauh turun dan harga karet anjlok sehingga dengan solusi yang diberikan oleh DPR menampung karet rakyat bisa membantu masyarakat harga karet mereka



stabil dan ekonomi mereka membaik,” ujar alumni Al Azhar, Kairo-Mesir itu.

Lebih lanjut ia berharap, kebijakan ini tidak hanya kebijakan saat pandemi Covid-19 saja, namun program ini terus berlanjut dan terkoordinir secara baik dan sistematis kedepannya. Apa lagu regulasi mengenai norma, standar, prosedur dan manual penggunaan karet untuk

campuran aspal sudah diterbitkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No.04/SE/M/2019.

“Mudah-mudahan kebijakan ini tidak hanya di zaman ini saja, karena nilai harga karet turun ini sudah tujuh tahun lebih lamanya. Kemudian ini menjadi kebijakan sebagaimana yang ada di surat edaran menteri tersebut,” pintanya.

Aleg PKS Minta Jaminan Ketersediaan BBM, Gas dan Listrik Terjangkau Masyarakat

"Saya berharap, ketersediaan energi berupa BBM, Gas dan Listrik ini bukan saja hanya untuk 3 bulan saja. Kita tidak tahu, Corona ini kapan usai. 450 T yang disiapkan pemerintah mesti efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (16/04) — Anggota DPR RI Komisi VI dari FPKK, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah pada penerapan aturan yang ditetapkan menteri ESDM mesti dapat

diimplementasi secara baik sehingga masyarakat merasa nyaman akibat kebijakan ini.

Kebijakan Menteri ESDM, yang dimaksud Nevi adalah ketentuan Menteri ESDM berupa Permen no.8 tahun 2020 tentang tatacara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.

Selain itu juga ada peraturan turunannya melalui Kepmen ESDM no 89 K/10/MEM/2020 tentang pengguna dan gas bumi tertentu di bidang industri,

Serta Kepmen ESDM no 90 K/10 /MEM/2020 tentang Penu-gasan kepada PT Pertamina (persero) dalam penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi di bidang industri.

"Khusus pada dukungan penanganan covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah dan semua institusinya, saya meminta memperhatikan point penting sektor energi ini. Perlu ada relaksasi kontrak jual beli pemasok gas yang dilakukan PGN, BPH Migas ada keringanan pada iuran kegiatan usaha untuk LNG dan realisasi insentif fiskal akibat Permen ESDM no 8 th 2020 dan Permen ESDM no 10 th 2020", ujar Nevi.

Politisi PKS ini mengata-

kan, saat ini masyarakat yang menjadi pelanggan-pelanggan PGN tidak dapat menyerap volume gas sesuai kontrak. Sebagian besar pelanggan industri mengurangi produksi atau menutup usahanya utk sementara.

Nevi menjelaskan, meskipun kini Kondisi ketahanan energi listrik diperkirakan aman selama masa bencana non alam akibat mewabahnya virus corona (Covid-19), namun sebagai fakta nyata bahwa hingga saat ini kita belum mendapat kepastian waktu kapan wabah ini bisa dikendalikan. Tindakan preventif dari seluruh BUMN Energi strategis seperti Pertamina, PGN dan PLN, menjadi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, bahwa kebijakan Pemerintah secara keseluruhan memberikan beragam stimulus untuk membantu masyarakat menghalau dampak pandemi Corona sudah baik, tapi implementasinya masih di tunggu oleh rakyat. Penggratiskan dan pemberian diskon tarif listrik akan efektif karena sasarannya merata kepada masyarakat banyak. Namun di lapangan banyak keluhan



masyarakat bahwa kebijakan ini belum diturunkan. Sasaran pemerintah melalui PLN, bahwa pelanggan 450 VA mendapat penggratiskan sedangkan pelanggan 900 VA mendapat diskon 50 persen masih belum cukup. Pelanggan 1.300 VA, kini juga sangat terdampak minimal mesti diberikan perlakuan semisal diskon 25%.

"Kami masyarakat Sumatera Barat sudah banyak berterima kasih kepada BPH MIGAS. Alokasi solar subsidi tahun

2020 naik 15% dibandingkan tahun 2019, padahal biasanya kenaikan solar cuman 1-3%. Namun antrian di spbu masih banyak terlihat", ungkap Nevi.

Anggota Fraksi PKS ini menyampaikan beberapa masukan dari masyarakat yang ia himpun, bahwa nasib rakyat (khususnya di pelosok) agak terganggu akibat kesulitan pasokan barang/jasa yang dibutuhkan akibat (BBM, Listrik).

Selengkapnya di fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Saadiah Uluputty, S.T.
Anggota Komisi VII DPR RI

Anggota FPKS: Harga BBM Mestinya Dapat Diturunkan Pemerintah

Dalam kondisi dimana dampak wabah virus corona menyebabkan darurat ekonomi, kebijakan menurunkan harga BBM menjadi stimulant bagi perekonomian. Turunnya harga BBM akan memperkuat daya beli masyarakat. Ini stimulasi yang positif di tengah perekonomian nasional yang goyah karena pandemik corona”

Anggota FPKS: Harga BBM Mestinya Dapat Diturunkan Pemerintah

Selama ini pemerintah selalu sigap untuk menaikan harga BBM ketika perubahan harga minyak mentah dunia menanjak. Langkah serupa harus dilakukan, saat komponen pembentuk harga BBM menurun. Itu sikap proporsional. Jangan hanya sumringah saat menaikan harga BBM, tapi respons rendah untuk menurunkan harganya”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (17/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menilai, pemerintah seharusnya dapat mendorong agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri diturunkan. Desakan ini dikemukakan oleh Saadiah, mencermati anjloknya harga minyak mentah sejak Maret 2020. “Harga minyak mentah dunia jatuh. Angkanya pada level US\$ 30 per barel. Harganya separuh dari asumsi harga minyak Indonesia atau

ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang ditetapkan US\$ 63 per barel”, sebut Saadiah di Jakarta (17/04).

Saadiah menilai, turunnya harga minyak dunia akan menurunkan biaya impor dalam neraca migas.

“Sejak 2013, neraca migas kita selalu negative. Kita menyangand status net importer minyak. Harga Minyak dunia mempengaruhi harga BBM non subsidi. Turunnya

harga minyak berdampak linier terhadap harga BBM non subsidi”, detail Saadiah.

Harga minyak mentah yang meluncur turun pada level US\$ 30 per barel, dapat menjadi pijakan untuk membuat perhitungan ulang dalam menetapkan harga baru BBM non subsidi yang lebih rendah dari harga saat ini.

“Pemerintah dapat melakukan hitungan untuk itu. Walaupun nilai rupiah terhadap dollar melemah dibanding dengan asumsi nilai kurs dalam APBN ditetapkan Rp 14.400 per Dollar AS”, kata Saadiah.

Namun harga minyak mentah yang cukup rendah menjadi argumen yang kuat untuk harga BBM non subsidi dapat didorong turun.

Dia menandaskan, dengan mencermati variabel pembentuk harga BBM yakni harga dasar, margin dan pajak, maka dipastikan harga keekonomian BBM saat ini jauh lebih rendah.

“Harga keekonomian BBM saat ini akan jauh lebih rendah



banding dengan harga keekonomian BBM dengan asumsi yang dipakai dalam APBN 2020”, imbuh aleg dari Fraksi PKS ini.

Maka wajar adanya, jika kebijakan menurunkan harga BBM menjadi opsi yang rasional.

Saadiah berالasan, selama ini pemerintah selalu sigap untuk menaikan harga BBM ketika perubahan harga minyak mentah dunia menanjak. Langkah serupa harus dilakukan, saat komponen pembentuk harga BBM menurun.

“Itu sikap proporsional. Jangan hanya sumringah saat menaikan harga BBM, tapi respons rendah untuk menurunkan harganya”, kritiknya.

Dalam kondisi dimana dampak wabah virus corona menyebabkan darurat ekonomi, kebijakan menurunkan harga BBM menjadi stimulant bagi perekonomian.

“Turunnya harga BBM akan memperkuat daya beli masyarakat. Ini stimulasi yang positif di tengah perekonomian nasional yang goyah karena pandemik corona”, katanya.

Wakil Ketua FPKS: Harusnya Kebijakan Pemerintah Ditetapkan Berbasis Data

prakiraan yang selama ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga berbeda-beda. Dan ini membingungkan publik. Pemerintah perlu merumuskan ulang prakiraan tersebut untuk mendapatkan hasil prediksi puncak Covid-19 yang lebih akurat dan terpercaya”

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Tangerang Selatan (18/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah membuat rumusan dan validasi prediksi puncak Covid 19 secara lebih komprehensif.

Pasalnya, menurut Mulyanto, prakiraan yang selama ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga berbeda-beda. Dan ini membingungkan publik.

“Pemerintah perlu merumuskan ulang prakiraan tersebut untuk mendapatkan hasil prediksi puncak Covid-19 yang lebih akurat dan

terpercaya”, tegasnya.

Sebelumnya beberapa lembaga seperti BIN, UI, ITB, Unbraw, UGM, LBM Eijkman melakukan berbagai riset pemodelan untuk memprediksi puncak Covid 19. Karena menggunakan metode dan input data yang berbeda, maka hasil prediksinya juga berbeda-beda.

“Menkeu Sri Mulyani sendiri menggunakan hasil dari BIN, UI dan UGM, yang memprediksi puncak Covid 19 terjadi di akhir Mei, untuk menetapkan realokasi APBN 2020 dan kebijakan fiskal dan

non-fiskal lainnya,” pungkasnya.

Semestinya Pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Kemenristek/BRIN segera menajamkan, merumuskan dan memvalidasi hasil-hasil riset pemodelan Covid 19 tersebut secara lebih komprehensif.

“Gunakan metodologi pemodelan yang standar, parameter yang lengkap dan data input yang akurat, agar prediksi puncak Covid-10 yang dihasilkan lebih terpercaya dan dapat menjadi acuan secara nasional,” ujar Mulyanto.

Mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi ini mengingatkan, bahwa sudah semestinya setiap kebijakan Pemerintah ditetapkan berdasar hasil kajian yang komprehensif dan akurat, istilahnya evidence based policy. Dengan demikian kebijakan tersebut memiliki basis empirik yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Mulyanto usai diskusi virtual dengan para peneliti BPPT, LIPI, BATAN, dll. dari Kawasan



Puspiptek (16/04/2020), yang membahas tentang ‘Model untuk Prediksi Puncak Covid-19’.

Mulyanto menyimpulkan, Indonesia punya peluang untuk menyelesaikan pandemi ini dalam waktu lebih singkat. Syaratnya Pemerintah melakukan uji cepat massif

kepada masyarakat; tegas dalam melaksanakan isolasi kepada mereka yang positif Covid 19, termasuk pelanggaran mudik lebaran bagi penduduk dari daerah merah; serta peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan pasien Covid-10.

Harga Minyak Dunia Terus Anjlok

Rofik Desak Pemerintah Segera Turunkan Harga BBM

Pemerintah jangan hanya sigap saat menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia naik, Pemerintah juga seharusnya sigap ketika harga minyak dunia turun dengan segera melakukan penyesuaian,

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (21/04) — Harga minyak mentah dunia terus anjlok ke Level terendah harga minyak sejak 1998. Turunnya harga minyak didunia disebabkan melemahnya permintaan akan konsumsi bahan bakar dan pasokan yang berlebih di tengah wabah virus corona.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (20/04/2020) hingga pukul 20.04 WIB, harga minyak jenis WTI untuk kontrak Mei 2020 di bursa Nymex terjun ke level US\$11,44 per barel, terkoreksi hingga 37,38 persen.

Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk kontrak Juni 2020 di bursa ICE bergerak melemah 5,98 persen ke level US\$26,4 per barel.

Terkait terus anjloknya har-

ga minyak dunia, Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, kembali meminta Pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga BBM. "Saat ini harga minyak dunia terus turun sampai ke titik terendah sejak 1998, seharusnya pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga BBM" kata Rofik

Rofik mengatakan Pemerintah jangan hanya sigap saat menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia naik, "Pemerintah juga seharusnya sigap ketika harga minyak dunia turun dengan segera melakukan penyesuaian," tegasnya.

Rofik meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Ke-

pmen tentang penurunan harga BBM jenis premium dan juga memerintahkan Pertamina untuk menurunkan harga pertalite dan pertamax menjadi sesuai dengan harga keekonomiannya.

"Pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan Kepmen ESDM tentang penurunan harga BBM jenis premium dan juga memerintahkan Pertamina untuk menurunkan harga pertalite dan pertamax menjadi sesuai dengan harga keekonomiannya." pungkask Rofik.

Sebelumnya pada 29 Maret 2020, Anggota DPR asal Purbalingga ini juga sudah meminta pemerintah untuk menurunkan Harga BBM. Kini Rofik kembali mendesak untuk segera menurunkan harga BBM.



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Marhaban Ya.. *رمضان* 1441 H
Ramadhan

Membangun Kebersamaan
untuk Mengatasi Persoalan-
Persoalan Bangsa

Ayo Lebih Baik

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



fraksi.pks.id

pksart

Apresiasi Kebijakan Mendikbud Belajar via TVRI

HNW Minta Menag Terapkan untuk Siswa Madrasah

“Saya berharap agar Menag merealisasikan usulan saat Raker dengan Komisi VIII DPR RI itu, yaitu membuat program pendidikan siswa-siswa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah maupun aliyah saat mereka belajar di rumah akibat pandemi, via TVRI,

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (14/04) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menggunakan media Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk belajar dari rumah siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), serta meminta agar Menteri Agama (Menag) melakukan hal yang serupa untuk siswa madrasah.

Hidayat yang akrab disapa HNW memuji langkah Mendikbud yang sesuai dengan

usulannya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Terobosan bagus dari Mendikbud yang mulai dilaksanakannya pada 13 April 2020 itu sesuai dengan usulan dari Dimiyati Natakusumah, Wakil Ketua BURT DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang sudah disampaikan sejak 25 Maret 2020 lalu,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (14/04).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini meminta agar kebijakan Mendikbud itu juga perlu ditingkatkan untuk Siswa Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana diusulkan

oleh Wakil Ketua Komisi X DPRRI, dari FPKS yaitu Fikri Faqih. Dan untuk memaksimalkan belajar di/dari rumah perlu ditekankan agar acara TV baik sebelum acara belajar siswa, di tengah-tengah, atau sesudah kegiatan belajar mengajar via TVRI itu agar disterilkan dari program-program lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan belajar dari rumah dan menghindarkan dari covid-19.

“Bagusnya diisi dengan lagu-lagu kebangsaan atau hiburan yang mendidik, meningkatkan wawasan, atau siaran-siaran yang meningkatkan cinta dan bangga dengan bangsa dan negara,” ujarnya.

HNW menegaskan bahwa Menag juga perlu meniru kebijakan Mendikbud yang sangat baik tersebut untuk para siswa madrasah, baik siswa madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah.

“Saya sudah usulkan ini saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama pada 25 Maret lalu. Harapannya dengan kebijakan pemerintah agar kegiatan belajar siswa selama berada di rumah dapat diisi



dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga tidak ada materi pelajaran yang tertinggal, bahkan bisa memaksimalkan waktu dengan segala yang meningkatkan kualitas peserta didik,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan ini.

“Saya berharap agar

Menag merealisasikan usulan saat Raker dengan Komisi VIII DPR RI itu, yaitu membuat program pendidikan siswa-siswa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah maupun aliyah saat mereka belajar di rumah akibat pandemi, via TVRI,” pungkasnya.

Berpotensi Kisrus, Netty Minta Program Kartu Pra Kerja Ditunda

Banyak keluhan soal sulitnya mengakses proses pendaftaran online KPK, proses rekrutmen off line yang sudah berjalan di beberapa tempat, bahkan ada kantor partai yang buka pendaftaran. Ada juga aturan soal 30 hari tidak daftar pelatihan maka KPK hangus. Alih-alih membantu malah bisa jadi balada pekerja,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Bandung (18/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menyori 110 Triliun anggaran Jaring Pengaman Sosial, yang 20 Triliun diantaranya dialokasikan untuk Kartu Prakerja. Sasarannya tentu saja pekerja terdampak Covid-19 agar tetap bisa bertahan hidup di tengah kesulitan.

"Kenapa malah jadi kisruh? Hak 3,4 juta per orang dipotong 1 juta untuk biaya pelatihan digital. Ironisnya lagi, total dana pelatihan 5,6 triliun itu dikelola oleh perusahaan yang masih ada koneksi dengan istana," sesal Netty Prasetyani, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR

RI, usai menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Online di RRI Cirebon, Jum'at, (17/04)

Menurut Netty, kerasnya kritik publik terhadap pelaksanaan program KPK menunjukkan ada yang salah dalam proses dan implementasinya.

"Banyak keluhan soal sulitnya mengakses proses pendaftaran online KPK, proses rekrutmen off line yang sudah berjalan di beberapa tempat, bahkan ada kantor partai yang buka pendaftaran. Ada juga aturan soal 30 hari tidak daftar pelatihan maka KPK hangus. Alih-alih membantu malah bisa jadi balada pekerja," tandas Netty.

Sebenarnya, kata Netty, program KPK ini masih menjadi bahan diskusi di Komisi IX terkait konsep dan implementasinya.

"Anehnya, program ini di-gawangi oleh Kemenko Perekonomian yang tidak memiliki mitra di DPR RI dan tidak melakukan fungsi teknis. Bagaimana proses pengawasannya?" ujarnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menambahkan bahwa ada tiga hal yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja ini, yaitu: efektivitas, sasaran dan skala prioritas, serta alokasi anggaran.

"Tujuan kartu ini adalah untuk re-skilling dan up-skilling para pencari kerja. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan hidup diri dan keluarga. Bukankah kebutuhan fisiologis itu yang pertama harus dipenuhi? Parahnya, jika tetap dilaksanakan sangat mungkin ada miss-match, karena supply tenaga kerja kita melimpah tapi lowongan pekerjaan bahkan hampir tidak ada," tandas Netty.

Lebih lanjut politisi PKS dapil Jabar VIII ini mengatakan



bahwa sasaran program ini adalah mereka yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan, baik informal atau formal, dan pelaku UMKM.

"Sementara program ini tidak memiliki basis data yang akurat. Satgas covid-19, menyebut 1,2 juta pekerja terdampak. Data kemenaker 2,8 juta lalu direvisi ikut data satgas nasional. Bagaimana masyarakat bisa percaya? Padahal ada kondisi lain di lapangan yang luput dari perhatian pemerintah, seperti PHK akibat Covid19," lanjutnya.

Berdasarkan Survei BPS Agustus 2019 mencatat angka pengangguran mencapai 7,05 juta, setengah pengangguran 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta.

Dari data tersebut, kata Netty, potensi sasaran penerima KPK bisa menjadi sangat besar akibat dampak Covid-19. "Bagaimana kartu ini dapat menjawab persoalan riil jika sasaran penerima 5,6 juta dan dengan potongan biaya lain pula," tanya Netty retoris.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Tunjangan Profesi Guru dan BOS

Jangan Dipotong!



Mereka ini dapat tunjangannya tidak besar, hanya bisa didapat dengan persyaratan ketat yang tidak mudah diperoleh, lalu pencairannya juga sering terlambat. Maka janganlah anggaran ini dipotong pula. Sebaiknya justru dipermudah dan dipercepat pencairannya misalnya menjadi setiap bulan. Bukan per minimal tiga bulan seperti saat ini

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI



Ledia Hanifa Minta Tunjangan Profesi Guru dan BOS Tidak Dipotong

"Mereka ini dapat tunjangannya tidak besar, hanya bisa didapat dengan persyaratan ketat yang tidak mudah diperoleh, lalu pencairannya juga sering terlambat. Maka janganlah anggaran ini dipotong pula. Sebaiknya justru dipermudah dan dipercepat pencairannya misalnya menjadi setiap bulan. Bukan per minimal tiga bulan seperti saat ini.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (17/04) — Pandemi Covid-19 membuat pemerintah memutuskan melakukan refocusing dan realokasi anggaran kementerian lembaga dalam rangka penanggulangan masalah terkait pandemi Covid-19.

Perpres no 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 pun dikeluarkan berikut lampiran yang menjelaskan detail jumlah perubahan dari setiap Kementerian dan Lembaga

Meski bisa memahami kepentingan refocusing dan realokasi anggaran di saat munculnya musibah global pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan salah satu anggaran yang terkena pemotongan adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagaimana

tertulis pada lampiran perpres No 54 Tahun 2020 bagian komponen nomor 2.2.2.2 dan 2.2.2.3

"Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah selama ini berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lain. Memotong anggaran ini justru akan semakin mempersulit kehidupan mereka," kata Ledia Hanifa menambahkan salah satu konsideran refocusing dan realokasi anggaran APBN selain untuk mensupport upaya penanggulangan penyakit juga untuk membantu kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung termasuk para guru dan tenaga kependidikan lainnya.

"Karena itu menjadi suatu kejanggalan bila alokasi yang selama ini sudah jelas terkait pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan justru dipotong. Apalagi jumlah pemotongan anggaran ini cukup fantastis. Anggaran TPG terkoreksi sekitar 2,9 Triliun Rupiah, sementara



anggaran BOS terkoreksi sekitar 856 Miliar Rupiah", ungkapnya.

Menurut Ledia, anggaran kegiatan Kementerian Lembaga yang tidak mungkin dilakukan semasa pandemik berlangsung seperti rapat, perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, ujian sekolah, pelatihan, kegiatan olahraga hingga kegiatan keagamaan dan budaya sangat tepat untuk direvisi dan dialihkan. Baik dialihkan untuk mensupport kegiatan kesehatan seperti pengobatan, penyediaan alat dan sarpras kesehatan, pengendalian wabah maupun untuk membantu kehidupan masyarakat yang semakin sulit karena terdampak Covid-19. Namun, anggaran yang terkait pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan selayaknya

dipertahankan, dimudahkan pencairannya dan kalau memungkinkan ditambah anggarannya.

"TPG dan BOS itu dapat dikatakan merupakan merupakan salah satu andalan guru dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Apalagi bagi sekolah swasta, guru non PNS dan guru honorer. Sangat banyak guru swasta atau guru honorer yang pendapatannya di bawah UMR. Maka TPG menjadi salah satu tambahan pendapatan bagi para guru. Sementara sekolah juga mengandalkan BOS untuk diantaranya membiayai guru honor.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tunjangan Guru Dipangkas

Fikri Faqih Protes Pemotongan Anggaran Pendidikan

“Guru salah satu dari banyak pihak yang harus kita perhatikan, terlebih di tengah musibah yang tengah berlangsung. Kalau memang harus dipotong, ya anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang,

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (14/04) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih protes keras atas pemotongan anggaran pendidikan melalui Keppres nomor 54/ 2020 yang baru diterbitkan.

“Disaat sulit pandemi wabah Covid 19, nafkah guru malah dipotong-potong,” katanya di Semarang, Selasa (14/4)

Fikri menilai, perubahan poster dan rincian APBN 2020 melalui Perpres 54/2020 merugikan sejumlah pihak yang justru sebaliknya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah

wabah Covid 19 sekarang ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyoroti pemotongan khususnya di sektor pendidikan. “Tunjangan guru malah dipotong hingga triliunan rupiah,” imbuh dia.

Selain itu, diskon anggaran juga diberikan untuk Bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Operasional PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya.

Dalam lampiran Perpres 54/2020, tunjangan guru dipotong setidaknya pada tiga

komponen. Yakni, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp. 53,8 T menjadi Rp. 50,8 T. Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS Daerah, semula Rp. 698,3 M menjadi Rp. 454,2 M. Kemudian tunjangan khusus guru PNS Daerah di daerah khusus, semula Rp. 2,06 T menjadi Rp. 1,98 T. “Totalnya mencapai Rp. 3,3 T,” cetus Fikri.

Pemotongan anggaran juga diterapkan untuk banyak komponen bantuan operasional pendidikan. Sebut saja, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semula Rp. 54,3 T menjadi Rp. 53,4 T. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD juga mengalami pemotongan dari Rp 4,475 T menjadi Rp 4,014 T. Adapun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dari Rp 1,477 T menjadi Rp 1,195 T. Sementara itu, pemotongan pada Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya adalah sebesar Rp 5,668 M dari semula Rp 141,7 M menjadi Rp 136,032 M.

“Guru salah satu dari



banyak pihak yang harus kita perhatikan, terlebih di tengah musibah yang tengah berlangsung,” ping Antinggota DPR dari Jawa Tengah ini.

Fikri menambahkan, pemotongan anggaran harus lebih tepat sasaran. “Kalau memang harus dipotong, ya anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang,” ucap dia.

Menurut Fikri, dalam

kondisi seperti ini, anggaran infrastruktur fisik, anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran bimtek, rapat-rapat ASN, merupakan prioritas untuk dipotong. Dan bukannya anggaran bantuan sosial bagi masyarakat banyak.

“Anggaran untuk bantuan seharusnya diperbesar, seperti anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan biaya pendidikan seperti KIP Kuliah,” ujarnya.

Fahmy Alaydroes Pertanyakan Manfaat Kartu Prakerja yang Dikampanyekan Pemerintah

Kenapa hanya kepada 8 platform tersebut? Padahal, konten-konten pelatihan gratisan banyak tersebar di dunia maya. Di Kemdikbud ada Pendidikan Non Formal itu yaitu LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), di Kemenaker ada LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), tapi mereka tidak dilibatkan?,"

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (21/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menyoroti anggaran Kartu Pra Kerja yang dinaikan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang.

Menurut Fahmy, anggaran Kartu Pra Kerja yang dikururkan pemerintah diperuntukkan untuk membayar insentif sebesar Rp 3,55 juta kepada 5,6 juta target peserta pelatihan Prakerja.

"Dari alokasi Rp 3,55 juta itu, Rp 1 juta dialokasikan untuk pelatihan kerja melalui online, yang dalam hal ini pemerintah telah menunjuk 8 mitra platform, yakni: Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak,

Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahri, dan Sisnaker," paparnya.

Fahmy melanjutkan, ada lebih dari 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform tersebut.

"Untuk bisa mengikuti pelatihan, biaya yang harus dibayarkan anggota Kartu Pra Kerja berkisar dari Rp 150 ribu hingga Rp 850 ribu. Jadi ada sekitar 5,6 Triliun yang akan mengalir ke 8 platform digital tersebut, yang menimbulkan banyak pertanyaan", tegas Anggota Komisi X DPR RI ini.

Meskipun niatnya baik, lanjut Fahmy, dalam rangka memberikan bekal keterampilan bekerja kepada

para penerima kartu pra kerja tersebut, namun kenapa hanya kepada 8 platform tersebut? Padahal, konten-konten pelatihan gratisan banyak tersebar di dunia maya. Di Kemdikbud ada Pendidikan Non Formal itu yaitu LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), di Kemenaker ada LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), tapi mereka tidak dilibatkan?," tanya Fahmy.

Hebatnya lagi, tandas Fahmy, keputusan ini nampak heroik dan populis karena semuanya demi kepentingan masyarakat kebanyakan yang terdampak. Kebijakan ini di 'alasi' oleh Perpu 1/2020 yang semuanya dalam kerangka niat baik pemerintah bertindak menyelamatkan negara dari kondisi darurat. Kebijakan yg diputuskan tidak dapat dipidanakan, sebagaimana dijamin oleh Perpu tersebut," Fahmy mempertanyakan.

Akan lebih bijak, kata Fahmy, apabila dalam situasi darurat dan sangat menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat, orang-orang kuat melindungi yang lemah, dan orang-orang yang berkecukupan membantu yang kekurangan.

"Pemerintah yang bijak se-



harusnya 'all-out' hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanah Konstitusi kita," ungkapnya.

Fahmy melanjutkan, Rumusan kebijakan harus sepenuhnya untuk dan demi masyarakat yang sangat membutuhkan, sumberdaya Negara harus dimanfaatkan untuk mereka.

"Pemerintah juga seharusnya menggandeng semua pihak

untuk ikut membantu mereka, bukan malah memberi peluang untuk "memanfaatkan" anggaran Negara untuk keuntungan ekonomi segelintir pihak," tuturnya.

Langkah baiknya, Fahmy menambahkan, bila platform-platform digital yang selama ini menikmati kue bisnis digitalnya yang lumayan besar, saatnya berbagi dan peduli.

Selengkapnya di Fraksi.pks.id

Mendesak! Aleg PKS: Realokasikan Anggaran Pindah Ibukota untuk Tangani Covid-19

Urusan pindah Ibu Kota Negara sudah tidak ada dalam prioritas negara. Anggaran yang ada sebaiknya kita fokuskan untuk tangani masalah wabah ini dan dampaknya yang sudah meluas. APBN sesuai mandat konstitusi untuk kesejahteraan rakyat

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (15/04) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah agar merealokasi anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sebelumnya ada dalam APBN 2020 sebesar Rp1,96 triliun untuk perencanaan dan persiapan dialihkan untuk program penanganan terkait pandemi Covid-19.

“Dulu sebelum darurat Covid-19 ini memang ada di anggaran Bappenas. Tetapi seharusnya sekarang dengan proses realokasi anggaran pada seluruh Kementerian dan Lembaga ini juga harus dialihkan untuk fokus pencegahan dan penanganan Covid-19. Sayangnya info di

Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 tidak terbuka terkait itu. Jadi kalau ini masih berjalan, kita mendesak dihentikan dan dialihkan semua”, paparnya menanggapi perkembangan yang ada.

Anggota Komisi XI DPR RI kecewa ketika mendengar informasi bahwa Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjalankan proses dan rencana pemindahan ibu kota negara di tengah wabah Covid-19. Bahkan informasi yang berkembang, proses tender penyusunan master plan Ibu Kota Negara (IKN) telah disiapkan dengan nilai yang tidak

sedikit, mencapai Rp 85 miliar.

“Ini jelas sudah bukan prioritas kita dimasa darurat pandemi ini. Kita butuh dana besar untuk pencegahan dan penanganan wabah korona ini. Jadi anggaran kesehatan harus disupport penuh. Ekonomi rakyat yang terdampak harus dibantu dengan bantuan yang cukup. Sekarang rakyat terdampak masih banyak yang belum terima. Sudah banyak yang PHK yang belum jelas skema untuk menolong mereka. Ini harus lebih menjadi prioritas utama”, tegasnya.

Tetap dilaksanakannya proyek IKN terungkap oleh beberapa media dari Dokumen Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan paket dengan kode 6740199 bernama Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN (Master Plan Ibu Kota Negara). Paket ini disiapkan pada 24 Maret 2020. Dengan Metode Penunjukkan Langsung dan APBN 2020.

Adapun kategori yang mengikuti tender ini adalah Jasa Konsultasi Badan Usaha. Dan karena penunjukkan



langsung maka hanya ada satu peserta. Adapun akhir dari pendaftaran ini pada 24 April 2020. Selain itu, ada beberapa tender lainnya yang terkait IKN. Seperti, paket penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk masterplan IKN.

Selanjutnya ada paket pengadaan Kajian Keanekaragaman Hayati dan Pangan untuk mendukung Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan IKN.

Tak hanya itu, ada lagi pa-

ket yang masih di Kementerian PPN atau Bappenas tentang kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk masterplan IKN.

“Urusan pindah Ibu Kota Negara sudah tidak ada dalam prioritas negara. Anggaran yang ada sebaiknya kita fokuskan untuk tangani masalah wabah ini dan dampaknya yang sudah meluas. | Baca Selengkapnya di fraksi.pks.id

Aleg PKS Dorong Pemerintah Segera Lakukan Percepatan Stimulus UMKM

“Pemerintah juga harus mempercepat restrukturisasi dan subsidi bunga kredit UMKM. Suku bunga KUR untuk UMKM ditetapkan 6 persen dan peluang restrukturisasi dan subsidi bunga akan membantu dan terasa saat kondisi seperti ini. Apalagi beberapa UMKM hampir nihil penjualan”

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (19/04) — Covid-19 terus menunjukkan sengatannya terhadap perekonomian, untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk menahan dampak ekonomi agar tidak terjerembab ke resesi.

Anggota Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa salah satu komponen ekonomi yang harus dijaga pemerintah adalah UMKM, mereka menjadi penopang ekonomi Indonesia.

Lihat saja porsinya terhadap PDB (Produk Domestik

Bruto) yang mencapai 61 persen, terhadap penyerapan tenaga kerja 97 persen, terhadap investasi 60 persen dan terhadap ekspor sekitar 14 persen. Untuk itu tidak bisa ditawarkan lagi bahwa stimulus harus disalurkan ke sektor UMKM.

Menurut catatan UMKM Crisis Center (2020), dampak covid-19 terhadap UMKM cukup signifikan. Sebanyak 36,7 persen tidak ada penjualan, 26 persen mengalami penurunan penjualan lebih dari 60 persen.

UMKM yang perjualannya turun 31-60 persen mencapai 15 persen, serta yang turun 10-30 persen mencapai 14,2 persen.

Terkait dengan upaya menjaga kinerja UMKM, Junaidi meminta pemerintah dan sektor keuangan mempercepat pemberian stimulus.

“Pemerintah harus mempercepat relaksasi pajak bagi UMKM, yang bernilai 0,5 persen. Jika mungkin, UMKM bebas pajak hingga tahun depan. Tahun lalu PPh Final UMKM mencapai Rp. 4,8 triliun.” tegas Junaidi.

“Pemerintah juga harus mempercepat restrukturisasi dan subsidi bunga kredit UMKM. Suku bunga KUR untuk UMKM ditetapkan 6 persen dan peluang restrukturisasi dan subsidi bunga akan membantu dan terasa saat kondisi seperti ini. Apalagi beberapa UMKM hampir nihil penjualan”.Tutup Junaidi.



Anggota FPKS: Pelemahan Daya Beli, Membuat Pengangguran Kian Meledak

Yang paling utama adalah bantuan tunai yang mampu menahan daya beli masyarakat minimal supaya tidak ambrol, agar ekonomi Indonesia tidak masuk dalam skenario terburuk. Jangan sampai besaran anggaran untuk atasi covid-19 itu berat sebelah, program jaring pengaman sosial pemerintah yang bersifat gimik harus ditiadakan

H. HIDAYATULLAH, S.E.

Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (17/04) Merebaknya gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah PHK terjadi diberbagai sektor, mulai dari manufaktur, transportasi, pariwisata, perdagangan dan sektor-sektor lainnya.

"Pemerintah harus mengestimasi dan

mengantisipasi peningkatan pengangguran pada kuartal II 2020," kata Hidayatullah.

Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini menyatakan bahwa berdasar data Kementerian Tenaga Kerja pada 16 April 2020 mencatat sebanyak 1,6 juta pekerja atau buruh di sektor formal maupun nonformal telah dirumahkan dan di-PHK.

"Ini kan jumlah yang tidak

main-main banyaknya" ujar Hidayatullah di Dapil Sumatera Utara Jumat, (17/04).

Hidayat menjelaskan, Indikator makronya terlihat dengan penurunan impor barang modal dan bahan baku. Impor barang konsumsi pun akan menurun seiring dengan penurunan daya beli.

Legislator asal Sumatera ini menambahkan, kecepatan penanganan wabah Covid-19 oleh pemerintah menentukan kecepatan pulihnya perekonomian dan daya beli masyarakat. Covid-19 diselesaikan terlebih dahulu baru kita recovery ekonomi.

Tidak ada gunanya stimulus ekonomi kalau covid-19 belum ditangani dengan tuntas. Ironisnya, secara faktual alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 justru lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi.

"Jika melihat situasi perekonomian nasional hari ini dan membaca data yang disampaikan para Ekonom,



pada skenario terburuknya Tingkat pengangguran terbuka pada kuartal II/2020 berpotensi meledak jadi 9,35 juta jiwa," ujar Hidayatullah.

Yang paling utama menurutnya adalah bantuan tunai yang mampu menahan daya beli masyarakat minimal supaya tidak ambrol, agar ekonomi Indonesia tidak masuk

dalam skenario terburuk.

Hidayatullah menyatakan, pemerintah harus memformulasi Anggaran yang berkeadilan.

"Jangan sampai besaran anggaran untuk atasi covid-19 itu berat sebelah, program jaring pengaman sosial pemerintah yang bersifat gimik harus ditiadakan" pungkasnya.

Pandangan Kritis Anis Byarwati

Terkait Perppu 1/2020 tentang Sistem Keuangan saat Pandemi

"Ini aneh, masalah yang kita hadapi ini adalah darurat kesehatan sebagaimana pernyataan presiden, tapi lebih dari separuh anggaran dialokasikan justru untuk insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi. Sedangkan alokasi anggaran utk kesehatan hanya 18,5% dari total tambahan belanja",

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati memberikan pandangannya terkait dengan Sistem Keuangan disaat Pandemi Covid-19, khususnya pada Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 27) Perpu No. 1 Tahun 2020.

Dalam Bab V, disebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang

keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Menurut Anis Byarwati, logika ini tidak masuk akal, karena dana yang digunakan tersebut merupakan anggaran APBN (APBN-P) lewat perbitan surat utang, yang nantinya dibayar oleh pemerintah.

"Pasal ini berpotensi

menjadi celah untuk penyelewengan, karena dari awal sudah dilindungi, dan di bagian lain, fungsi BPK utk melakukan audit dibungkam, padahal potensi penyalahgunaan dana sangat tinggi," beber Anis.

Aleg dari Dapil DKI Jakarta Timur ini juga menyampaikan bahwa ini menekankan agar Perppu No. 1/2020 dibaca dan dipelajari secara cermat dan hati-hati.

Dia juga memberikan catatan penting, terkait kebijakan Pemerintah menganggarkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan dampak Covid-19, dengan alokasi Rp.75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp.110 Triliun untuk Social Safety Net, Rp.70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya



tahan dan pemulihan ekonomi.

"Kita bisa lihat dengan jelas dari alokasi Rp 405 T itu, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarnya mencapai Rp 70,1 T + 150 T = Rp220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi," paparnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menganalisa adanya kejanggalan dan keanehan dalam perumusan anggaran.

"Ini aneh, masalah yang kita hadapi ini adalah darurat kesehatan sebagaimana pernyataan presiden, tapi lebih dari separuh anggaran dialokasikan justru untuk insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi. Sedangkan alokasi anggaran utk kesehatan hanya 18,5% dari total tambahan belanja", tegas Anis.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Selamat Hari Kartini

21 April 2020



RA. Kartini,
Inspirasi Membangun
Semangat Pendidikan
Melalui Keluarga



8 ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN FRAKSI PKS DPR RI

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si. - Hj. Nevi Zuairina - Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag. - Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T - Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. - Saadiyah Uluputty, S.T. - Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

Bukhori Berikan Tiga Catatan terkait Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah situasi krisis kesehatan hari ini tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan publik. Apalagi, stigma sebagian masyarakat terhadap RUU ini cenderung memandang negatif

KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Baleb DPR RI

Jakarta (16/04) — Anggota Fraksi PKS mengajukan keberatan untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasan hingga Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 telah berakhir di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat kerja baleb DPR bersama pemerintah membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Bukhori Yusuf, anggota baleb DPR dari Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa terdapat tiga catatan penting yang melandasi argumen keberatan PKS terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Pertama, dari skala prioritas, kondisi kedaruratan kesehatan yang tengah terjadi saat ini sepatutnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah ketimbang burburu membahas RUU yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat.” ungkap Bukhori

“Kedua, sejumlah pasal dalam RUU ini menuai kontroversi di masyarakat, khususnya pasal terkait ketenagakerjaan. Kami khawatir jika pembahasan dilakukan di tengah situasi genting saat ini akan semakin menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” sambungnya

“Ketiga, dengan

diterbitkannya Perppu No.1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Covid-19, urgensi RUU Cipta Kerja menjadi teredusir dan tidak menjadi prioritas untuk dibahas saat ini. Apalagi, jika muatan yang dibahas hanya seputar investasi dan ekonomi di tengah kesulitan masyarakat saat ini. Jika terus dilanjutkan, sense of crisis kita selaku pemangku mandat rakyat perlu dipertanyakan.” ungkap Bukhori selepas rapat kerja virtual baleb DPR bersama pemerintah, Selasa (14/04/2020)

Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah situasi krisis kesehatan hari ini tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan publik. Apalagi, stigma sebagian masyarakat terhadap RUU ini cenderung memandang negatif. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar untuk saat ini pemerintah seyogyanya fokus dulu pada penanganan Covid-19 hingga Presiden mengumumkan secara resmi bahwa wabah Covid-19 di Indonesia telah berakhir.



Legislator Nevi Zuairina Bantu Warga Miskin Terdampak Covid-19

Beliau (Nevi Zuairina) juga sudah membagi ribuan paket sembako untuk masyarakat miskin di Pariaman, Pasaman, Agam dan beberapa daerah lainnya di Dapil Sumbar 2 Beliau juga bagi-bagi masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran Virus Corona

NOVERMAL

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan45

Pesisir Selatan (17/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina kembali menysihkan sebagian rizkinya untuk berbagi kepada warga yang terdampak Covid-19.

Kali ini, istri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ini berbagi ke wilayah yang bukan daerah pemilihannya ke Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.

"Alhamdulillah, bantuan beras Ibu Gubernur (Nevi Zuairina-red) ini sangat

membantu kami masyarakat miskin di kampung ini," sebut Yeni (40 tahun) seorang ibu yang hidup sendiri, ketika menerima bantuan beras dari Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 tersebut, Jumat (17/04/2020).

Kebahagiaan yang sama juga dirasakan oleh 99 keluarga masyarakat miskin lainnya yang juga menerima bantuan dari Politisi PKS tersebut.

"Walau kami tidak memilih beliau di Pemilu lalu, Alhamdulillah kami juga bisa menikmati bantuan dari Ibu

Gubernur," ujar Rohani (60 tahun), emak-emak miskin yang lainnya.

Bantuan beras Nevi Zuairina yang juga menjabat Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat tersebut mengalir ke nagari Koto VIII Pelangai tersebut atas fasilitasi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal.

"Alhamdulillah, bantuan beras Ibu Nevi bisa mengalir ke nagari Koto VIII Pelangai sebanyak 500 kilogram," sebut Novermal di sela-sela penyerahan beras bantuan tersebut.

"Bantuan ini dibagi untuk 100 KK masyarakat miskin, dan masing-masing KK mendapat 5 kilogram," tambahnya.

Dijelaskan Novermal, Politisi Nevi Zuairina juga sudah membagi ribuan paket sembako untuk masyarakat miskin di Pariaman, Pasaman, Agam dan beberapa daerah lainnya di Dapil Sumbar 2.

"Beliau juga bagi-bagi masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk pencegahan



penyebaran Virus Corona," ujar Novermal.

Camat Ranah Pesisir, Zul Arzil, yang didampingi Walinagari Koto VIII Pelangai, Syafridul dan Kepala Kampung Koto VIII Hilir, Endri Manto mengapresiasi bantuan dari Nevi Zuairina tersebut. "Ini

sangat membantu sekali," ujarnya.

"Karena, kuota bantuan dengan masyarakat yang harus dibantu tidak seimbang," tambahnya sambil berharap donatur kian bertambah.

Beri Bantuan APD

Toriq Apresiasi Puskesmas sebagai Garis Depan Lawan Covid-19

Kita belum tahu kapan pandemik ini akan usai. Seiring bertambahnya kasus covid 19 yang sudah mencapai puluhan ribu kasus. Namun jumlah sarana rawat inap di Rumah Sakit untuk Pasien dalam pantauan (PDP) masih sangat kurang. Maka Puskemas naik ke Garis Depan dalam hal pencegahan dan tindakan pertama pengobatan masyarakat yang terdampak covid 19"

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

Tasikmalaya (17/04) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Toriq Hidayat berkunjung ke Puskesmas Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (15/04/2020).

Kunjungan Toriq ke Puskesmas kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Petugas Kesehatan di Puskesmas. Bantuan APD ini diterima langsung oleh Ketua

UPTD Puskesmas Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

"Kami prihatin dengan berita saat awal pandemik covid 19 di Tasikmalaya, ada Petugas Kesehatan yang menggunakan jaket hujan dan celana tebal. Kemudian mereka harus menjaga jarak, tanpa kontak fisik dengan pasien. Hal ini terjadi karena tidak ada APD," Jelas Toriq.

"Alhamdulillah saat kunjungan ke puskesmas Ciawi ini, APD sudah tersedia.

Tambahan Bantuan APD dari PKS untuk mencukupi kebutuhan beberapa waktu kedepan", imbuhnya.

Selanjutnya Anggota Komisi I DPR ini menyampaikan betapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama saat pandemik covid 19 saat ini.

"Kita belum tahu kapan pandemik ini akan usai. Seiring bertambahnya kasus covid 19 yang sudah mencapai puluhan ribu kasus. Namun jumlah sarana rawat inap di Rumah Sakit untuk Pasien dalam pantauan (PDP) masih sangat kurang. Maka Puskemas naik ke Garis Depan dalam hal pencegahan dan tindakan pertama pengobatan masyarakat yang terdampak covid 19", tegas Toriq.

Saat ini semua puskesmas di Indonesia sudah dilakukan pelatihan via online tentang penanganan pandemik covid 19 dan sudah melaksanakan



aktivitasnya dengan baik. Misalnya dalam melakukan skrining pasien terduga positif Covid-19 dan langkah yang harus dilakukan setelah hasil skrining diketahui.

Toriq Hidayat berharap agar petugas kesehatan di Puskesmas tetap melindungi diri dengan baik dan benar

dengan peralatan yang ada saat ini dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Bantu Warga Terdampak Covid-19,

Rofik Berikan Paket Sembako

“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa Purwonegoro-Banjarnegara dalam menghadapi penyebaran virus corona di desanya, ini menunjukan bahwa pemerintah desa benar-benar serius melindungi warganya dari penyebaran virus yang mematikan ini”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jateng VII

Banjarnegara (17/04) — Wabah Virus Corona belum juga menunjukkan angka penurunan, terca-
t Per Hari ini Pasien Positif Corona di Indonesia Sejumlah 5.136 Orang, 469 Orang Meninggal Dunia dan 446 Orang Sembuh, dengan penyebaran yang semakin meluas.

Kondisi ini membuat banyak daerah memberlakukan pembatasan akses keluar masuk. Hal ini dilakukan dalam rangka memutus penyebaran virus corona.

Salah satunya adalah Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dimana per tanggal 26 Maret Pemerintah desa sudah memberlakukan Local lock down di desanya.

Kepala Desa Purwonegoro,

Renda Sabita Noris mengatakan wilayahnya telah melaksanakan lock down lokal. Maksudnya pembatasan bagi pendatang yang masuk ke Desa Purwonegoro.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi penyebaran Virus Corona dari orang luar kampung atau yang dibawa oleh para perantau. Selain itu warga juga kami larang untuk keluar dari rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak.

“Pemerintah desa juga menyiapkan Tempat Karantina khusus untuk para pemudik atau pendatang dari luar daerah kami yang terpaksa harus mudik, agar sebelum mereka bertemu dengan keluarga dan warga, dapat kita pastikan bahwa kondisinya benar-benar

sehat” Tambah Renda

Abah Toto, Tokoh Masyarakat Desa Purwonegoro menyambut baik dan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dia juga mengajak semua pihak terlibat.

“Saya menyambut baik dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, serta mengajak semua pihak untuk terlibat” Katanya

Tercatat per hari Senin, 13 Maret 2020 Warga Purwonegoro sudah ada 1 yang positif Covid-19, diketahui yang bersangkutan sebelumnya mengikuti kegiatan keagamaan di Gowa, Sulsel. Dengan adanya 1 warga positif ini, pemerintah desa semakin memperketat akses keluar masuk ke desanya.

Untuk membantu warga desa Purwonegoro khususnya warga yang kurang mampu, Anggota DPR RI FPKS dapil Jawa Tengah VII Rofik Hananto, memberikan bantuan berupa paket sembako dan anti septik.

Rofik mengatakan upayanya ini merupakan bentuk perhatian bagi warga yang terdampak dengan Covid-19.

“Ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah desa Purwonegoro, semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat



khususnya masyarakat yang tidak mampu.” ungkapnya.

Rofik juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa Purwonegoro-Banjarnegara dalam menghadapi penyebaran virus corona di desanya, ini menunjukkan bahwa pemerintah desa benar-benar serius melindungi warganya dari penyebaran virus yang mematikan ini” katanya

“Apa yang dilakukan pemerintah desa purwonegoro seharusnya menjadi contoh bagi pemerintah pusat, agar pemerintah pusat benar-benar

serius dalam penanganan wabah virus corona ini.” Tambahnya

Dengan adanya bantuan paket sembako dan anti septik ini, Kepala Desa Puwonegoro mengucapkan banyak terima kasih, dan dia berharap semoga kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19.

“Terima Kasih Bapak Rofik Hananto atas bantuan kepada masyarakat desa Purwonegoro, Semoga bermanfaat, Semoga berkah dan semoga pandemi covid-19 ini kita bisa atasi bersama-sama. Semoga Pak Rofik senantiasa diberikan kesehatan” ungkap Kepala Desa.

HNW Minta Kepala BP2MI & Menlu Bantu WNI Terdampak Covid-19 di Luar Negeri

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, Kepala BP2MI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Aspirasi-aspirasi itu penting untuk segera dikabulkan. Dan untuk itu penting untuk dilakukan koordinasi dan kerjasama yang maksimal dengan Menlu, yang sebelumnya juga sudah disurati

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (16/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengucapkan selamat kepada Benny Ramdhani yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sebagai bukti kompetensinya, pria yang akrab disapa HNW memintanya segera bergerak cepat untuk peduli melindungi, membantu dan merealisasikan aspirasi WNI & para pekerja migran Indonesia di luar negeri dari dampak pandemi Covid-19.

"Kepada Benny Ramdhani yang baru dilantik sebagai Kepala BP2MI. Banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain menyampaikan aspirasi bahwa

mereka sangat kesulitan akibat Covi-19. Mereka minta dibantu, dilindungi bahkan dievakuasi. Selamat membantu mereka, Pak, tentu dengan kerjasama maksimal sebagai Menlu". ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (16/04).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, salah satu tugas dari Kepala BP2MI adalah memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

"Koordinasi ini harus dilakukan secara maksimal," ujarnya.

Apalagi, HNW yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II meliputi luar negeri mengaku menerima banyak aspirasi dari konstituenya di luar negeri terkait kebutuhan perlindungan pemerintah Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini. Aspirasi-aspirasi tersebut juga secara langsung sudah disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia.

"Ada surat terbuka untuk Presiden Jokowi dari Koordinator Serikat Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi, dan juga pernyataan bersama Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia. Mereka sampaikan agar Pemerintah RI segera membantu, melindungi atau mengevakuasi pekerja migran Indonesia atau WNI yang terdampak Covid-19," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini.

HNW menuturkan bahwa aspirasi ini penting dan perlu dijawab oleh Benny Ramdhani yang baru diangkat sebagai Kepala BP2MI dan sekaligus sebagai pembuktian kredibilitasnya untuk diamanahkan sebagai Ketua BP2MI.



"Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, Kepala BP2MI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Aspirasi-aspirasi itu penting untuk segera dikabulkan. Dan untuk itu penting untuk dilakukan koordinasi dan kerjasama yang maksimal dengan Menlu, yang sebelumnya juga sudah disurati," ungkapnya.

Dalam rangka melaksanakan amanah aspirasi dari WNI di LN dan PMI, HNW sudah menyampaikan surat terbuka

dan surat bersama dari 19 organisasi massa warga Indonesia di Malaysia itu ke MenLu, juga Mensesneg dan ke komisi 1 DPR yg membidangi LN dan komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja. Sangat penting lembaga2 negara tersebut bisa membantu kesulitan WNI di LN dan PMI terdampak covid-19, dan terwujudnya permohonan WNI di LN dan PMI sampai tingkat evakuasi kembali ke Indonesia.

Anggota FPKS Adakan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Korban Covid-19

PKS terjun langsung membantu pada saat masyarakat takut dan menjauhi jenazah korban covid 19. Kami mencoba yang terbaik untuk jenazah dengan ditangani secara profesional sesuatu standart Menkes dan WHO sebagaimana yang dibuatkan Gugus tugas dan tentunya yang muslim sesuai Agama Islam

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

Solo (15/04) — Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari melakukan segala daya dan upayanya, mulai dari menyisihkan gaji, memberikan bantuan APD, Masker dan Sembako hingga melakukan pelatihan dan pelayanan pemulasaraan jenazah Covid-19.

"PKS berusaha dari waktu

kewaktu bahkan sebelum pandemi covid-19 untuk membantu rakyat di seluruh Indonesia dari upaya kami di Senayan yang mendorong pemerintah mengantisipasi segera, hingga yang terbaru kami dari team Kepanduan PKS seluruh Indonesia bahu-membahu melakukan pelatihan dan pelayanan pemulasaraan jenazah GRATIS untuk semua korban Covid-19 semaksimal yang bisa kami lakukan, Insya

Allah" jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media di sela-sela Rapat Koordinasi Relawan Kepanduan PKS Solo Raya hari Rabu (15/04).

Abdul Kharis yang merupakan Pembina kepanduan DPP PKS menambahkan, bahwa Kepanduan PKS sejak tiga hari terakhir telah melakukan pelatihan standar Pemulasaraan jenazah Covid-19 hingga teknis pemakaman sesuai aturan yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan untuk di Solo sudah bekerjasama dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Solo.

"PKS terjun langsung membantu pada saat masyarakat takut dan menjauhi jenazah korban covid 19. Kami mencoba yang terbaik untuk jenazah dengan ditangani secara profesional sesuatu standart Menkes dan WHO sebagaimana yang dibuatkan Gugus tugas dan tentunya yang muslim sesuai Agama Islam " jelas Anggota DPR yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.

Kharis menambahkan



hingga hari ini, sementara tim pemulasaraan baru di Solo, kemudian akan meluas ke seluruh Jawa Tengah dan Insya Allah seluruh Indonesia, melalui jejaring Kepanduan PKS. Saat ini beberapa jenazah covid-19 dari rumah sakit Moewardi sudah dipulasarakan oleh tim Kepanduan PKS.

"Semoga dari upaya kami yang kecil ini, tidak lagi membuat kekhawatiran masyarakat bagaimana bersikap terhadap jenazah saudara kita yang menjadi korban covid-19 kewajiban kita menghantarkan korban sesuai nilai Agama dan Kemanusiaan" tutup Kharis.

Prihatin Kondisi Warga Terdampak Covid-19

Nur Azizah Tamhid Salurkan Bantuan

"Program ini dilakukan agar seluruh Anggota DPR menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Depok (19/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, membagikan sejumlah paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, di Depok, Jawa Barat, Ahad (19/04/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini bersama Anggota DPRD Prov. Jawa Barat Imam Budi Hartono, membagikan ratusan paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng dan sarden.

Dalam kesempatan tersebut Nur Azizah menyampaikan pembagian sejumlah sembako, sesuai dengan Instruksi Presiden PKS serta Arahan Ketua Fraksi PKS

DPR RI.

"Program ini dilakukan agar seluruh Anggota DPR menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," pungkasnya.

Nur Azizah mengaku sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat secara umum, karena persebaran Covid-19 yang cukup tinggi khususnya Kelurahan Tugu, Depok, Jawa Barat.

"Hal ini tentu berdampak secara ekonomi dan beban kehidupan masyarakat semakin berat," tutur wanita berkacamata ini.

Lebih lanjut Nur Azizah berharap semoga upayanya dapat membantu mengurangi beban masyarakat.

"Yang paling penting dari apa yang sudah dilakukan adalah senantiasa berdo'a agar wabah segera berlalu dan masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti sediakala," harapnya.

Sebelumnya, kegiatan berbagi sembako terselenggara atas kerjasama dengan DPRa PKS Tugu dengan penerima bantuan diantaranya Majelis Taklim Warga RT 02/11, Komunitas Bank Sampah Depok dan sebagainya.



Amin Sumbang Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19 dan APD untuk Tenaga Medis

“Sumbangan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap warga yang terdampak pandemi Covid 19 baik yang ada di dapil maupun di lingkungan tempat tinggal di Surabaya

AMIN. AK

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV

Surabaya (19/04) — Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak memberikan sumbangan 2,5 ton beras dan ratusan paket berisi mie instan, biskuit, minyak goreng, dan kurma kepada masyarakat yang terdampak wabah pandemi virus Corona di Jember dan Lumajang, Minggu (19/04).

Sehari sebelumnya, Amin juga menyampaikan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis berupa baju APD (hazmat) dan masker yang disumbangkan kepada RS Wiyung Sejahtera Surabaya.

Untuk sumbangan beras, Amin menyampaikannya melalui

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Jember dan Lumajang untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk paket sembako, Amin menyampaikannya langsung ke masyarakat yang terdampak.

“Kebijakan social distancing dan pembatasan aktivitas lainnya berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat, bahkan ada yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena perusahaannya juga terdampak. Namun langkah tersebut harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran wabah,” ungkapnya.

Saat memberikan bantuan, Amin meminta masyarakat bersabar atas musibah nasional

ini dan tetap menghindari kerumunan, menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah.

Amin juga meminta masyarakat menjaga diri dan keluarga dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk tidak tertular Covid-19 dengan menjalankan semua prosedur pencegahan penyebaran wabah.

Sementara itu, hazmat dan masker, diterima langsung oleh Ketua Tim Penanganan Covid 19 RS Wiyung Sejahtera, dr. Irvan dan Direktur RS Wiyung Sejahtera, Johari Mustawan.

Anggota Komisi VI itu mengaku prihatin dengan sulitnya tenaga medis memperoleh APD yang diperlukan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. “Sumbangan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap warga yang terdampak pandemi Covid 19 baik yang ada di dapil maupun di lingkungan tempat tinggal di Surabaya,” kata Amin.



Akibat Covid-19, HNW Berikan Bantuan untuk WNI Terisolasi di Malaysia

Agar ada kepedulian, berupaya melindungi dan membantu memberikan kebutuhan pokok kepada pekerja migran Indonesia yang kesulitan hidup selama diberlakukannya pembatasan gerak di Malaysia

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (19/04) — Sejak tanggal 19 Maret 2019 pemerintah Malaysia melakukan Perintah Kawalan Pergerakan atau Movement Control Order (MCO) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan Malaysia yang merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran tentu saja berdampak langsung kepada kehidupan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mayoritas bekerja di sektor jasa, konstruksi, pekerja kebun sawit dan pabrik.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR dan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberikan kepedulian bantuan kepada TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menghadapi kesulitan hidup.

Selain TKI yang ada di wilayah semenanjung (Kuala Lumpur) bantuan yang diberikan juga sampai ke daerah-daerah di selangor, Penang, perak hingga ke perkebunan di Sabah dan Serawak, melalui Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) Partai Keadilan Sejahtera dan Relawan HNW di Malaysia, bantuan di distribusikan dari satu ladang ke ladang yang lain dalam bentuk sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, telur dan mie instan serta masker, yang didistribusikan langsung oleh PIP PKS dan Relawan HNW. Di beberapa daerah bantuan di berikan dalam bentuk voucher belanja di Warung untuk memudahkan distribusi.

Pekerja Migran Indonesia di pedalaman Malaysia menyambut gembira datangnya bantuan tersebut. Aswar pekerja asal Sulawesi Selatan selaku mandor perkebunan di Serawak mengucapkan terima kasih.

"Saya mewakili teman-teman mengucapkan terimakasih, bisa dapat bantuan ini, agar kami bisa bertahan hidup. Karena saat ini banyak teman-teman yang tidak bisa kerja akibat ladang dan pabriknya tutup. Sementara gaji kami dihitung harian, sehingga kami tidak ada pendapatan," ujar Aswar.

Selama ini bantuan dari pemerintah melalui KBRI/KJRI tidak sampai ke ladang-ladang dan jauh dari kota.

HNW sebagai Wakil Rakyat turut prihatin atas kondisi Pekerja Migran Indonesia, karenanya sebelumnya HNW sudah mengirimkan surat langsung ke Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia di Malaysia.

"Agar ada kepedulian, berupaya melindungi dan membantu memberikan kebutuhan pokok kepada pekerja migran Indonesia yang kesulitan hidup selama diberlakukannya pembatasan gerak di Malaysia,"



turnya.

HNW juga menyampaikan bantuan ke MenLu, Mensos maupun BP2MI agar Pemerintah melaksanakan kewajiban Negara terhadap WNI di Luar Negeri termasuk yg menjadi TKI/PMI.

"Seperti harapan para pimpinan organisasi PMI/TKI di Malaysia, HNW juga sudah menyampaikan Surat Bersama Ormas-ormas Warga Indonesia yg berada di Malaysia kepada Menlu dan BP2MI, krn PMI menyampaikan kondisi mereka yang semakin berat, dan karenanya menginginkan agar

Pemerintah segera membantu dengan melindungi dan bahkan mengevaluasi PMI/TKI di Malaysia", tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

HNW pun berharap pemerintah menyiapkan bantuan, program dan skema keuangan untuk pekerja migran yang terdampak langsung oleh krisis Covid-19, "tidak hanya di Malaysia namun juga di negara tujuan pekerja migran lainnya seperti di Arab Saudi", imbuhnya.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Cegah Covid 19, Toriq Berikan Bantuan Masker ke Pedagang Pasar

Pasar adalah akses kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pasar merupakan simbol Ekonomi, Sosial Budaya dan ciri khas suatu daerah. Namun Pasar juga berpotensi menjadi sumber penyebaran covid 19 maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat pasar untuk peduli terhadap anjuran pencegahan covid 19

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

Tasikmalaya (18/04) — Toriq Hidayat, Anggota DPR RI Fraksi PKS menyampaikan data yang didapat dari salah satu media bahwa kasus Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya hingga Rabu (15/04/2020) jumlah orang dalam pantauan (ODP) 1.211 orang.

"Alhamdulillah. Untuk Kabupaten Tasikmalaya terkonfirmasi belum ada warga yang positif Covid-19", ujarnya. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I asal Fraksi

PKS ketika berkunjung ke Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Toriq menambahkan bahwa walaupun belum ada warga yang positif covid 19 namun Saya terus meminta kepada Pemerintah Daerah dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap waspada dan berusaha optimal mencegah penyebaran Covid 19.

"Saya dengar kabar sebanyak 40.000 warga perantau kembali pulang dari

daerah yang masuk zona merah penyebaran virus corona. Alhamdulillah..Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya langsung gerak cepat menetapkan mereka sebagai orang tanpa gejala (OTG) dan meminta mereka untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya," Jelas Toriq.

Selanjutnya berkaitan dengan kunjungan yang dilakukannya ke Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Toriq hidayat memberikan bantuan masker gratis kepada masyarakat pasar dan mengajak mereka untuk bersama mencegah penyebaran covid 19. Pemberian bantuan masker ini dilakukan dengan menjalankan prosedur pencegahan Covid 19 yakni menggunakan masker dan physical distancing.

Bantuan masker gratis ini diterima oleh Ketua Pengelola Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Beliau mengucapkan terimakasih



kepada PKS dan berjanji akan langsung membagikannya kepada seluruh pedagang pasar dan pengunjung pasar.

Ciawi ini tambahhya.

Toriq juga meminta kepada ketua pengelola pasar agar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Sterilisasi menjadi sebuah keharusan untuk mencegah penularan Covid-19 di Pasar

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Teddy Setiadi Salurkan Paket Sembako

Kita tahu masyarakat yang terdampak begitu banyak, kesulitan semakin bertambah, tetapi dengan keterbatasan yang kita miliki kita harus tetap hadir membantu meringankan beban masyarakat

TEDDY SETIADI, S.I.Kom.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar I

Bandung (17/04) — Dalam rangka mengatasi dampak dari pencegahan penularan Covid-19, Teddy Setiadi, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Cimahi mendistribusikan 1500 paket sembako kepada masyarakat Kota Bandung, Selasa (14/04/2020)

Bersama Relawan Teddy Setiadi (Ready), paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, kecap, dan susu disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak akibat social distancing dan pembatasan-pembatasan aktivitas lainnya

yang menyebabkan pendapatan ekonomi berkurang bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang justru kehilangan pekerjaan.

"Kita tahu masyarakat yang terdampak begitu banyak, kesulitan semakin bertambah, tetapi dengan keterbatasan yang kita miliki kita harus tetap hadir membantu meringankan beban masyarakat," ujar Teddy.

Sebagaimana diketahui Fraksi PKS DPR RI, Anggota DPRD Provinsi sampai Anggota DPRD Kota/Kab dari PKS telah mengalokasikan gaji untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

Kini, masing-masing anggota dewan kembali hadir meringankan beban masyarakat khususnya Teddy Setiadi.

Teddy Setiadi juga berpesan agar masyarakat menjaga diri dengan membiasakan pola hidup sehat, menjaga jarak, dan memakai masker.

"Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, oleh karena itu mari kita bergotong royong dan saling tolong menolong, seraya memohon kepada Allah swt. agar terhindar dari wabah ini dan pandemi ini semoga segera berakhir."



Prihatin Kurangnya APD, Iskan Sumbangkan Gajinya untuk Tangani Covid-19

Insya Allah, ini merupakan tanggungjawab sosial saya kepada masyarakat khususnya di dapil saya, sudah selayaknya kita saling bergotong royong memikul beban dalam menghadapi wabah corona ini, apalagi kita jumpai dimana-mana langka nya alat kesehatan seperti Hazmat/alat pelindung diri (APD), hand sanitizer, disinfektan, masker, dan lain sebagainya di berbagai daerah," ujar Iskan.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumut II

Medan (18/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyumbangkan sebagian gajinya untuk pembelian Alat Kesehatan bagi para tenaga medis, puskesmas dan Rumah sakit daerah di wilayah tabagsel (tapanuli bagian selatan) meliputi kota padangsidempuan, padang lawas utara, tapanuli selatan, mandailing natal, dan padang lawas.

Hal ini dalam pemenuhan

kebutuhan alat kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Virus Corona disease 2019 (Covid-19).

"Insya Allah, ini merupakan tanggungjawab sosial saya kepada masyarakat khususnya di dapil saya, sudah selayaknya kita saling bergotong royong memikul beban dalam menghadapi wabah corona ini, apalagi kita jumpai dimana-mana langka nya alat kesehatan seperti

Hazmat/alat pelindung diri (APD), hand sanitizer, disinfektan, masker, dan lain sebagainya di berbagai daerah," ujar Iskan.

Pada kesempatan tersebut, Iskan menyerahkan bantuan berupa Hazmat (Alat pelindung diri/APD) 400 pcs, Sanitizer 200 liter, disinfektan 250 liter, masker 50 kotak, handscoon (sarung tangan) 200 kotak, kacamata pelindung 250 pcs.

"Ini masih tahap awal, untuk distribusi nya saya serahkan ke wilayah tabagsel dulu, dimulai dari Kota padangsidempuan, padang lawas utara, tapanuli selatan, mandailing natal, dan padang lawas. Saya serahkan melalui gugus tugas Covid-19 kota/kabupaten masing, dan saya juga siapakan tim untuk bantu pendistribusian nya ke rumah sakit daerah hingga ke puskesmas-puskesmas serta klinik-klinik di pelosok daerah" tandasnya.

Salah satu pimpinan gugus tugas di kota padang sidempuan yang juga wakil walikota Padang Sidempuan, Arwin



Siregar menerima bantuan sumbangan tersebut mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan untuk pencegahan dan penanganan terhadap pandemi Covid-19 dari Anggota DPR RI, Iskan Qolba Lubis.

"Bantuan ini sangat berharga mengingat alat dan bahan kesehatan sangat dibutuhkan selama pandemi virus Corona ini masih ada," ujarnya

Selain itu iskan juga mengajak semua masyarakat untuk mendoakan agar wabah corona ini dapat segera berlalu, dan petugas-petugas medis yang menangani virus ini juga selalu dilindungi Allah SWT dalam bertugas.

"Mereka itu (para dokter dan petugas medis lainnya)

adalah salah satu pejuang dalam memutus rantai wabah corona ini, saya serahkan bantuan ini bukan hanya kepada Rumah sakit rujukan Covid-19 saja, tetapi puskesmas-puskesmas dan klinik-klinik di pelosok pun harus dibantu, dan seluruh petugas medis memerlukan perlengkapan tersebut saat ini," paparnya.

"Miris hati saya melihat sampai saat ini saja sudah puluhan dokter dan tenaga medis lainnya yang meninggal dalam bertugas mengemban amanahnya. Jadi sekali lagi, bantuan ini semata-mata pertanggungjawaban sosial saya kepada masyarakat, dan saya berharap agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu" tutup Iskan

Ringankan Beban Warga Terdampak Covid-19

Mahfudz Bagikan Sembako

upaya membagikan sembako, merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan keluhan dan beban yang dirasakan masyarakat. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk terus aktif membantu meringankan beban masyarakat di daerah pemilihan

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Bekasi (19/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, membagikan sejumlah sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Bekasi, Jawa Barat, Selasa-Rabu, (14-15/04/2020).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak akibat mewabahnya virus Corona beberapa pekan terakhir ini.

Mahfudz mengaku upaya membagikan sembako, merupakan bentuk keseriusan

dalam memperhatikan keluhan dan beban yang dirasakan masyarakat.

"Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk terus aktif membantu meringankan beban masyarakat di daerah pemilihan," pungkasnya.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan apa yang dilakukannya bersama para relawannya di beberapa wilayah semoga bisa membantu warga dalam menghadapi Covid-19, khususnya dengan melakukan beberapa aktivitas.

"Mulai dari penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan hand sanitizer, juga memberikan jahe merah dan beras kepada masyarakat yang saat ini terdampak Covid-19", paparnya.

Upaya ini, kata Mahfudz, dilakukan secara serentak oleh semua anggota dewan Fraksi PKS, sebagai bentuk arahan langsung yang disampaikan Presiden PKS, M. Sohbul Iman dan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.



PROFIL

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A



Investasi Paling Berharga adalah **KELUARGA**

Akhir pekan ini dalam program #KeluargaPKS kita akan berkenalan dengan Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II H. Iskan Qolba Lubis, M.A. Saat ini Iskan diberikan amanah sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi Agama dan Sosial.

Iskan lahir 1 Juli 1961 di Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara. Menikah dengan Emi Asfiati Hasibuan

wanita dan telah karunia lima buah hati yaitu Abdan Syakuro Lubis, Huzaifah Mahbubi Lubis, Ammar Mandili Lubis, Nuswah Az-Zahroh Lubis dan Himmah Izzati Lubis.

Menikah Magister Islamic Studies Punjab Lahore Pakistan 1991.

Sebelum terpilih dan bergabung dalam DPR-RI, beliau menjadi dosen di Sekolah Tinggi Tafsir Hadits dari tahun 2002 - 2008, juga Ma'had Al-Hikmah

Jakarta sejak tahun 1993-2000.

Perjalanan Iskan menjadi politisi tidak terlepas dari peran dan dukungan keluarga. Suka dan duka dilewati dengan penuh kesabaran serta kesyukuran.

Pesan Iskan untuk keluarga Indonesia "Investasi yg paling berharga adalah merawat dan memajukan keluarga "

Untuk mengetahui sepak terjang H. Iskan Qolba Lubis, MA dapat mengikuti social media:

Facebook : Iskan Qolba Lubis

Twitter : @IskanQL

SOCMED : iskanql



Investasi yg paling berharga adalah merawat dan memajukan keluarga

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI